

Asumsi Dasar
EKONOMI MAKRO
DALAM APBN



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Grafik	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Pendahuluan	1
Produk Domestik Bruto (PDB)	5
Pertumbuhan Ekonomi	19
Inflasi	29
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika	39
Suku Bunga SBI-3 Bulan	45
Harga Minyak	53
Produksi Minyak	61
Penutup	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Target dan Realisasi Produk Domestik Bruto, 2005 – 2011	10
Grafik 2.	Grafik 2. PDB dan Tingkat Inflasi, 2005 – 2010	11
Grafik 3.	Pertumbuhan PDB Nominal, periode 2005 – 2010	12
Grafik 4.	Kontribusi komponen penggunaan terhadap PDB Nasional, 2010	13
Grafik 5.	Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB, 2010	14
Grafik 6.	Kontribusi Propinsi Terhadap PDB Nasional	15
Grafik 7.	PDB per Kapita Indonesia harga berlaku, 2005 – 2010	16
Grafik 8.	PDB Nominal: Negara-negara terpilih, 2009	17
Grafik 9.	PDB per Kapita : Negara-negara terpilih, 2009	18
Grafik 10.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, 2005 – 2011	20

Grafik 11.	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN, 2005 – 2011	25
Grafik 12.	Pertumbuhan Ekonomi Cina, India dan Jepang, 2005 – 2011	26
Grafik 13.	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Barat, 2005 – 2011	27
Grafik 14.	Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Nasional 2010	31
Grafik 15.	Sumbangan Komoditas Dominan terhadap Inflasi Nasional 2010	33
Grafik 16.	Perkembangan Inflasi 2005-2011	31
Grafik 17.	Perbandingan Inflasi di Beberapa Negara	37
Grafik 18.	Perkembangan nilai tukar rupiah 2005-2011	40
Grafik 19.	Perkembangan nilai tukar mata uang beberapa negara terhadap dolar AS periode 2005-2010	43
Grafik 20.	Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI 3 bulan 2005-2011	47
Grafik 21.	Harga Minyak Indonesia	57
Grafik 22.	Produksi Minyak Indonesia	62
Grafik 23.	Asumsi Indonesia Crude Price dan Lifting dalam APBN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, 2005 – 2010	21
Tabel 2.	Pertumbuhan Komponen Pengeluaran pada PDB, 2005 – 2010	22
Tabel 3.	Perbandingan Suku Bunga SBI 3 bulan dengan Bank Sentral Amerika (<i>The Fed Rate</i>)	51
Tabel 4.	ICP Formula 2011 (<i>Benchmark</i>)	55
Tabel 5.	ICP Formula 2011	56
Tabel 6.	Asumsi Indonesia Crude Price dan Lifting dalam APBN	57
Tabel 7.	Produksi Minyak dan Kondensat	56
Tabel 8.	Produksi Gas Alam, Batubara, Panas Bumi	66
Tabel 9.	Asumsi Lifting Minyak dalam APBN	67
Tabel 10.	Produksi, Konsumsi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sensitivitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Besaran APBN	24
Gambar 2.	Sensitivitas Inflasi terhadap Besaran APBN	35
Gambar 3.	Sensitivitas Nilai Tukar Rupiah terhadap Besaran APBN	42
Gambar 4.	Sensitivitas Tingkat Suku Bunga SBI 3-Bulan terhadap Besaran APBN	49
Gambar 5.	Sensitivitas Harga Minyak terhadap Besaran APBN	58
Gambar 6.	Peta Lokasi Kilang Minyak dan Kapasitas Produksi di Indonesia	61
Gambar 7.	Sensitivitas Produksi Minyak terhadap Besaran APBN	64

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai peranan sangat penting dalam membangun perekonomian yang kokoh. APBN disusun setiap tahun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah menyusun dan melaksanakan kebijakan fiskal tersebut untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum, melalui belanja negara yang bersumber dari pendapatan negara dan hibah. Jika terjadi defisit anggaran, dimana belanja negara lebih besar dari pendapatan negara dan hibah, maka defisit akan dibiayai dengan pembiayaan dalam dan luar negeri. Karena kebijakan fiskal mempunyai peranan yang sangat penting, maka perlu diperhatikan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang menentukan besaran APBN, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto/PDB (miliar Rupiah);
2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%);
3. Tingkat Inflasi (%);
4. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (Rp/US\$1);
5. Tingkat Suku Bunga SBI-3 Bulan (%);
6. Harga Minyak (US\$/Barrel), dan
7. Produksi/*Lifting* Minyak Mentah (juta barrel/hari).

Penggunaan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil diharapkan akan menyebabkan bergeraknya sektor ekonomi sehingga akan melahirkan banyak lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran akan dapat diatasi, sehingga secara otomatis angka kemiskinan dapat dikurangi.

Secara singkat, PDB menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mampu untuk membayar pajak dan menggunakan fasilitas atau jasa pemerintahan. Sehingga terhadap APBN, PDB mempengaruhi besaran penerimaan pajak dan bukan pajak, serta bagian pemerintah atas laba BUMN. Sedangkan di sisi belanja, PDB akan mempengaruhi belanja barang, subsidi dan pemberian baik dalam dan luar negeri.

Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi, pengaruh terhadap APBN hampir sama dengan PDB. Jika dilihat dari sisi pendapatan negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi penghasilan dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pajak dan PNBP yang dapat dihimpun semakin tinggi. Demikian sebaliknya terjadi jika tingkat pertumbuhan ekonomi menurun. Terhadap belanja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka sarana dan prasarana yang diperlukan pemerintah dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin tinggi.

Sementara untuk inflasi, dengan semakin tingginya tingkat inflasi maka penerimaan pajak dalam negeri dalam APBN akan semakin tinggi, dan sebaliknya terjadi. Hal ini karena tingginya inflasi membuat nilai mata uang rupiah semakin rendah. Disisi belanja, semakin tingginya inflasi maka akan semakin tinggi harga barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Untuk nilai tukar, dimana dalam APBN yang digunakan adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, juga akan berpengaruh terhadap sisi pendapatan dan belanja. Disisi pendapatan negara, nilai tukar mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional, serta penerimaan SDA. Sedangkan pada sisi belanja negara, nilai tukar akan mempengaruhi belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pemberian defisit.

Terhadap APBN, untuk tingkat bunga SBI-3 Bulan, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin tinggi beban yang ditanggung pemerintah terhadap pembayaran bunga utang baik dalam dan luar negeri, serta subsidi bunga kredit program. Disisi lain, tingginya tingkat suku bunga akan

menyebabkan rendahnya penarikan pinjaman luar negeri. Hal ini disebabkan menjadi besarnya biaya meminjam di luar negeri, sehingga semakin kecil utang luar negeri yang akan ditarik oleh Pemerintah.

Sedangkan terhadap harga minyak mentah di pasar internasional dan produksi/*lifting* minyak, sangat berpengaruh terhadap penerimaan sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam, serta PPh migas dalam APBN. Sedangkan terhadap belanja negara, kedua asumsi ini akan mempengaruhi subsidi BBM dan dana bagi hasil ke daerah.

Secara garis besar, pengaruh ketujuh asumsi tersebut dalam penentuan besaran APBN adalah sebagai berikut:





PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB)



Produk Domestik Bruto

Nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara pada periode tertentu.

(Mankiw, 2004, *Principles of Economics 3rd ed.*)

- PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu pada periode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di satu negara pada periode tertentu (BPS, Data Strategis, 2010).
- Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku (nominal) maupun atas dasar harga konstan (riil).
- **PDB atas dasar harga berlaku (nominal)** menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
- **PDB atas dasar harga konstan (riil)** menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah tahun 2000.
- PDB atas dasar harga berlaku (nominal) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan (riil) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
- Untuk menghitung angka-angka PDB ada **tiga pendekatan** yang dapat digunakan, yaitu:



1. Pendekatan Produksi

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini diklasifikasi menjadi 9 (sembilan) lapangan usaha (sektor) yaitu:

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
- Pertambangan dan Penggalian;
- Industri Pengolahan;
- Listrik, Gas dan Air Bersih;
- Konstruksi;
- Perdagangan, Hotel dan Restoran;
- Pengangkutan dan Komunikasi;
- Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan,
- Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Balas jasa faktor produksi antara lain adalah: (1) upah dan gaji, (2) sewa tanah, (3) bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Penggunaan

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. pengeluaran konsumsi pemerintah
- c. pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. perubahan inventori, dan
- e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti:

1. Produk Nasional Bruto (PNB)
yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.
2. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar
yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
3. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi
yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional.

4. Angka-angka per kapita

yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Manfaat data PDB

Data PDB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

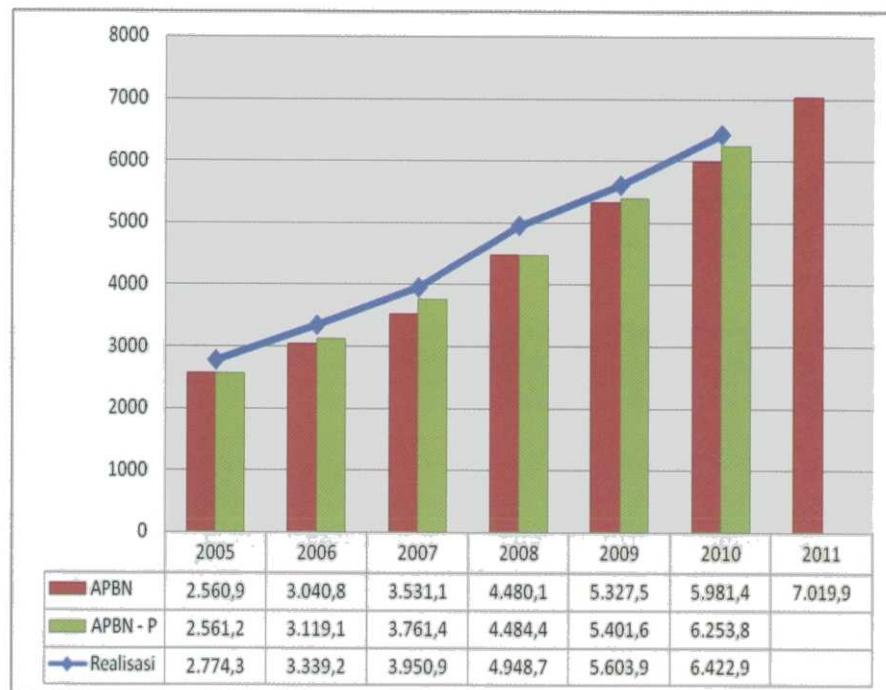
1. PDB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PNB harga berlaku (nominal) menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.
3. PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDB harga berlaku (nominal) menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
5. PDB harga berlaku (nominal) menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
6. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

7. PDB penggunaan atas dasar harga konstan (riil) bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
8. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk.
9. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan (riil) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Trend PDB Nominal

Realisasi PDB nominal sepanjang periode 2005 - 2010 cenderung berada di atas target yang diamanatkan oleh APBN dan APBN-P. Pada tahun 2010, Realisasi PDB nominal mencapai Rp6.422,9 triliun atau Rp6,4 kuadriliun. Angka ini lebih besar dibandingkan target APBN (Rp5.981,4 triliun) dan APBN-P (Rp6.253,8 triliun). Pada tahun 2011 pencapaian PDB nominal nasional ditargetkan sebesar Rp7.019,9 triliun atau Rp7,01 kuadriliun.

Grafik 1. Target dan Realisasi Produk Domestik Bruto, 2005 – 2011 (Rp triliun)



Sumber: BPS, Kemenkeu, Data Pokok APBN 2005 – 2010

Keterangan :

Angka APBN-P tahun 2005 berasal dari angka APBN-P II

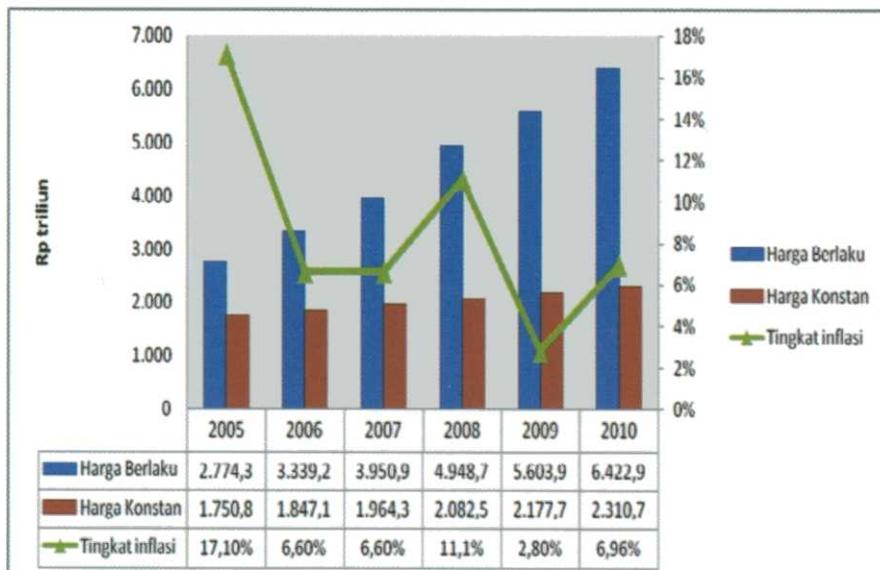
Angka APBN-P 2009 merupakan angka Kesepakatan Panja APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah

Angka APBN-P 2011 adalah angka Kesepakatan Panja APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah

Angka Realisasi PDB tahun 2008 – 2010 mengacu pada Berita Resmi Statistik BPS, 7 Februari 2010

Sepanjang periode 2005 - 2010, PDB Indonesia, baik berdasarkan harga berlaku (nominal) maupun harga konstan (riil) terus mengalami peningkatan.

Grafik 2. PDB dan Tingkat Inflasi , 2005 – 2010



Sumber: BPS

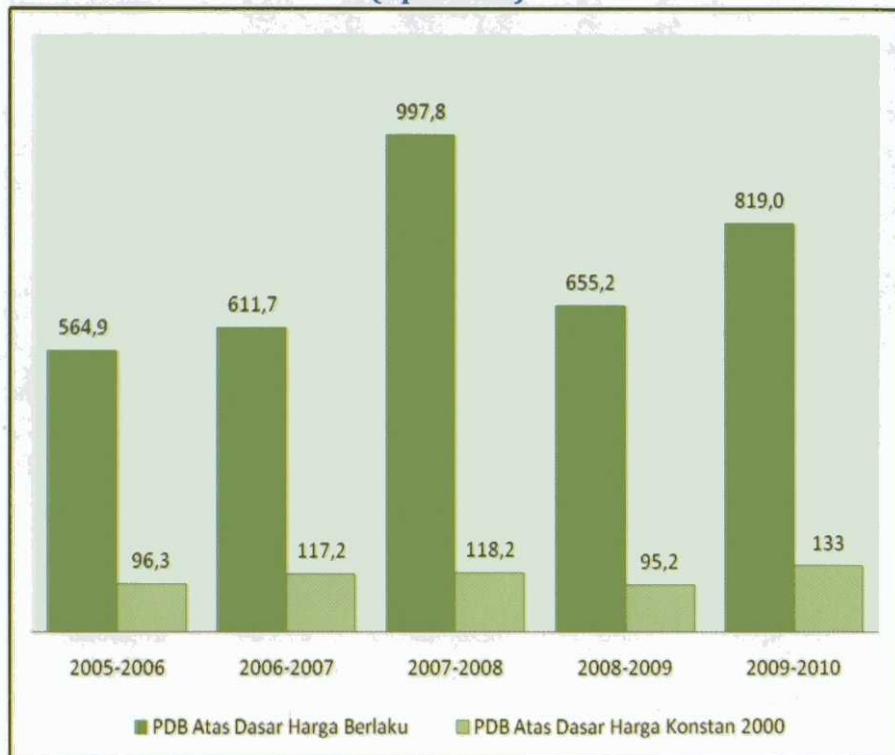
Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2005 nilai PDB Nominal adalah sebesar Rp2.774,3 triliun sedangkan pada tahun 2010 mencapai Rp6.422,9 triliun. Dengan kata lain PDB nominal selama periode 2005 - 2010 meningkat sebesar Rp3.648,6 triliun dengan peningkatan terbesar terjadi pada periode 2007 - 2008 sebesar Rp997,8 triliun dan peningkatan nominal terkecil pada periode 2005 - 2006 sebesar Rp564,9 triliun.

Namun apabila ditinjau dari tingkat harga tahun 2000, peningkatan nilai PDB berdasarkan harga konstan tidaklah sebesar nilai PDB berdasarkan harga berlaku. Berdasarkan harga konstan, PDB nominal Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar Rp2.310,7 triliun, meningkat sebesar Rp559,9 triliun dibandingkan angka PDB tahun 2005.

Sepanjang periode 2005 - 2010, peningkatan terbesar PDB nominal berdasarkan harga konstan terjadi pada periode 2009 - 2010 dengan pertumbuhan nominal sebesar Rp133 triliun.

Besarnya selisih antara nilai PDB atas harga berlaku (nominal) dengan PDB harga konstan (riil) menunjukkan bahwa faktor kenaikan harga atau inflasi pada periode 2005 - 2010 ikut mempengaruhi tingginya angka PDB .

**Grafik 3. Pertumbuhan PDB Nominal, periode 2005 – 2010
(Rp triliun)**



Sumber: BPS

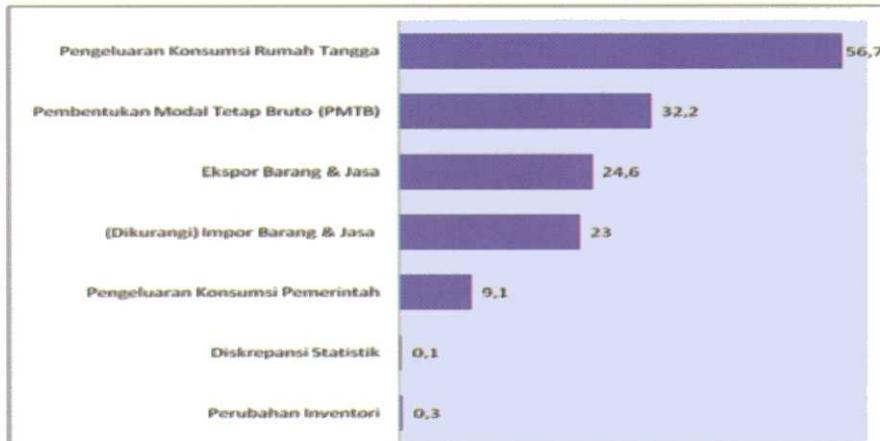
PDB dari sisi Produksi, 2010

Pada tahun 2010, Sektor Industri Pengolahan tercatat sebagai sektor yang paling banyak berkontribusi kepada PDB Nasional yaitu sebesar 24,8%, diikuti oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (15,3%), serta Perdagangan, Hotel dan Restoran (13,7%). Sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,8%.

PDB dari sisi Penggunaan, 2010

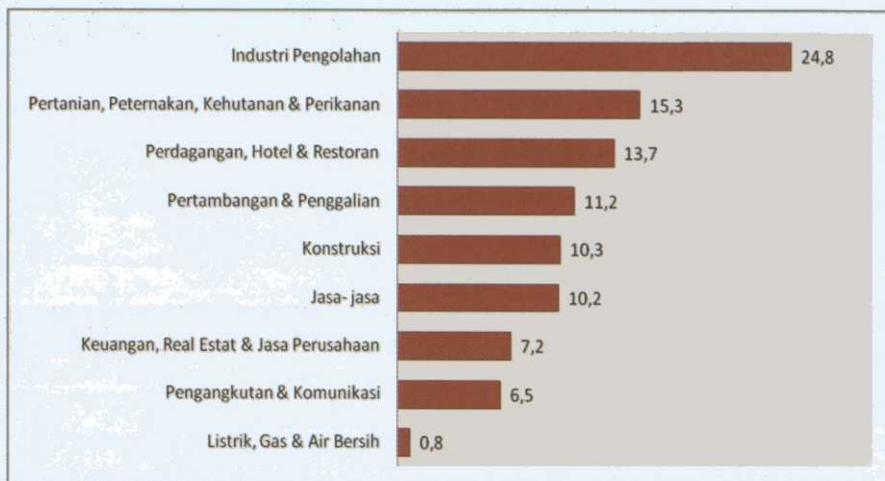
Dari sisi penggunaan, kontribusi terbesar terhadap PDB Nasional bersumber dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,7 persen, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 32,2 persen, serta Ekspor dan Impor masing-masing berkontribusi sebesar 24,6 persen dan 23 persen. Sedangkan Konsumsi Pemerintah menyumbang sebesar 9,1 persen.

Grafik 4. Kontribusi komponen penggunaan terhadap PDB Nasional, 2010 (%)



Sumber: BPS

Grafik 5. Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB, 2010 (%)



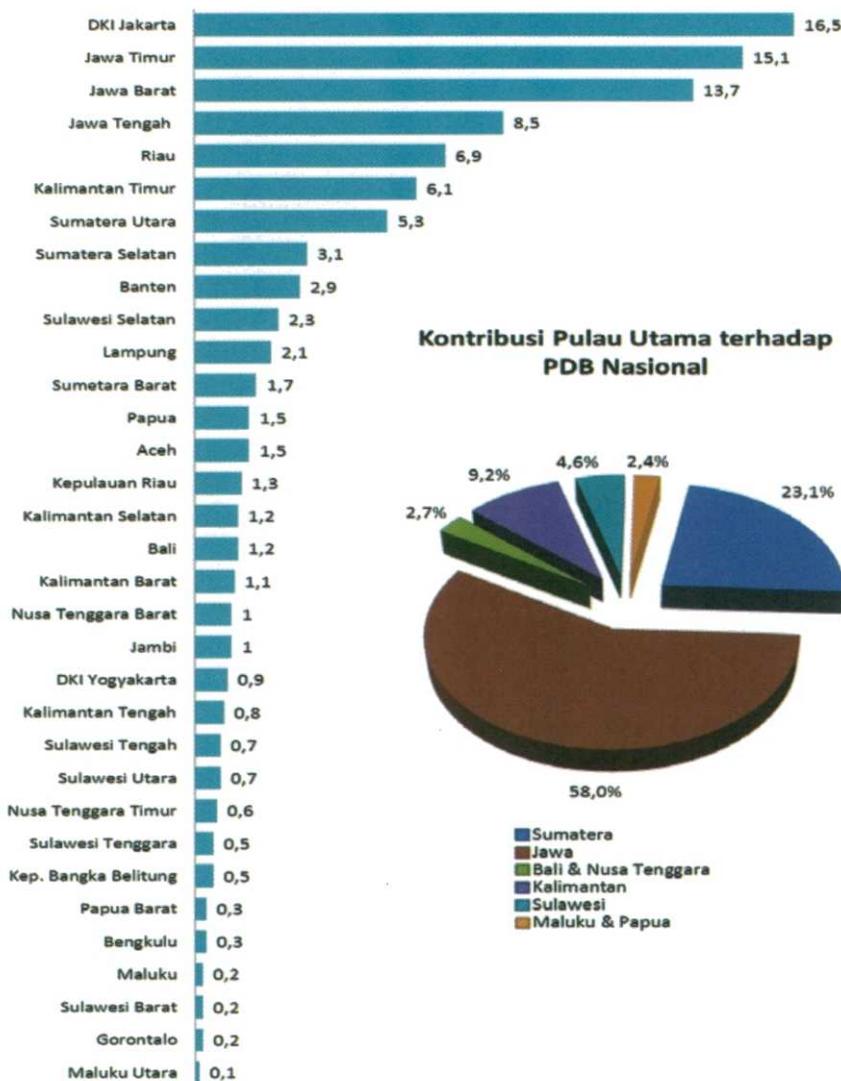
Sumber: BPS

Pulau Jawa memiliki kontribusi dominan dalam pembentukan PDB Nasional dengan kontribusi sebesar 58% dari total PDB, disusul oleh Pulau Sumatera (23,1%), Kalimantan (9,0%), Sulawesi (4,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,7%) serta Maluku dan Papua (2,4%).

Empat provinsi penyumbang terbesar adalah DKI Jakarta (16,5%), Jawa Timur (15,1%), Jawa Barat (13,7%) dan Jawa Tengah (8,5%). Sedangkan Maluku (0,2%), Sulawesi Barat (0,2%), Gorontalo (0,2%) dan Maluku Utara (0,1%) merupakan 4 provinsi dengan kontribusi terkecil terhadap PDB Nasional.

Grafik 6.

Kontribusi Provinsi Terhadap PDB Nasional (%)



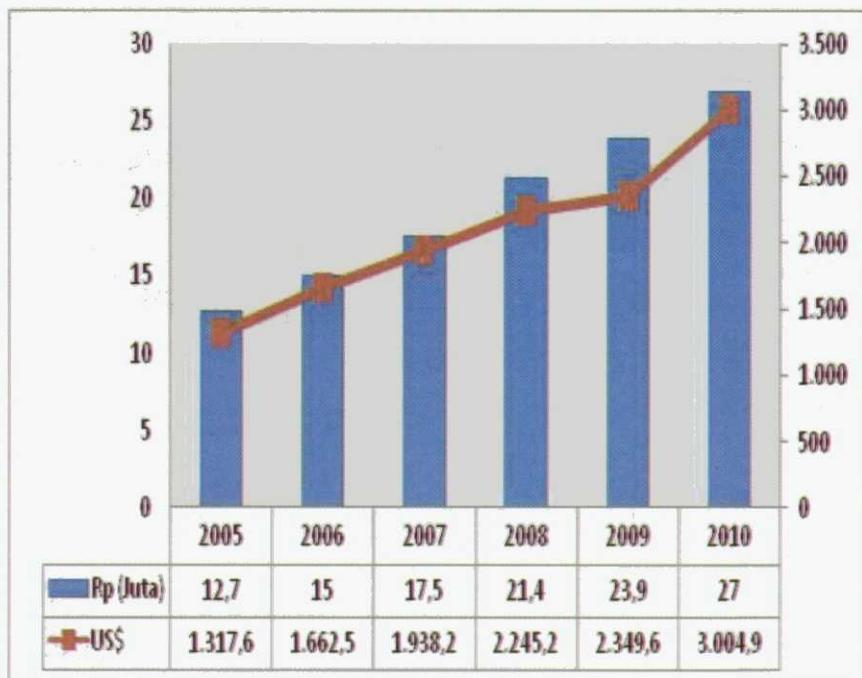
Sumber : BPS, data Provinsi menggunakan data Triwulan III 2010

PDB per kapita

PDB per kapita atas dasar harga berlaku 2010 mencapai Rp27,0 juta (US\$3.004,9), naik dari nilai tahun 2009 sebesar Rp23,9 juta (US\$2.349,6).

Dalam kurun waktu 2005-2010 PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp12,7 juta (US\$1.317,6), tahun 2006 sebesar Rp15,0 juta (US\$1.662,5), tahun 2007 sebesar Rp17,5 juta (US\$1.938,2), tahun 2008 sebesar Rp21,7 juta (US\$2.269,9), dan tahun 2009 mencapai Rp23,9 juta (US\$2.349,6).

Grafik 7. PDB per Kapita Indonesia harga berlaku, 2005 – 2010



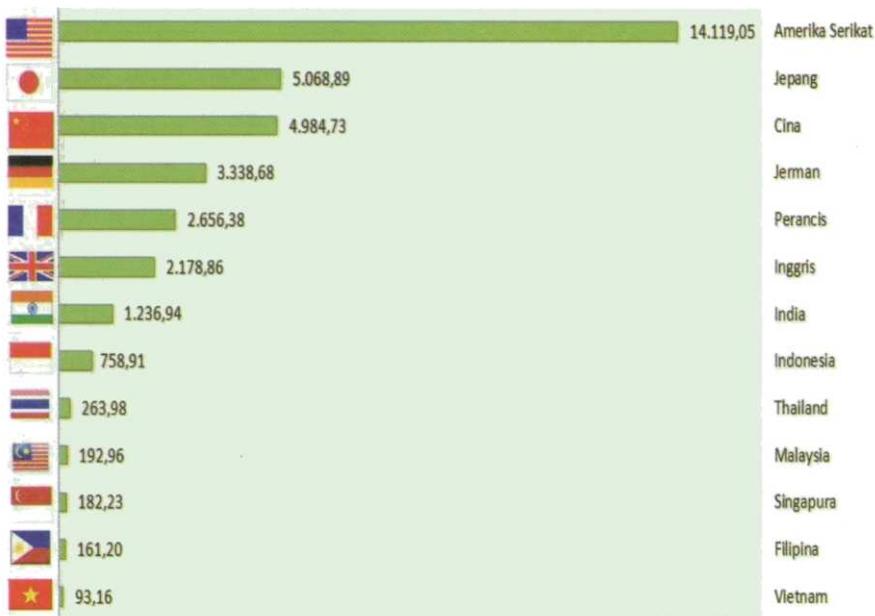
Sumber : BPS

Perbandingan PDB Nominal Indonesia dan Negara lain

PDB Nominal Indonesia terhitung besar apabila dibandingkan dengan negara-negara di wilayah ASEAN, namun terbilang kecil bila dibandingkan dengan India, Cina, Jepang dan negara-negara barat.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan data tahun 2009 Amerika Serikat merupakan perekonomian terbesar di dunia dengan PDB Nominal sebesar US\$ 14.119 triliun atau 18,60 kali lipat target PDB Nominal Indonesia untuk tahun 2011 sebesar US\$ 758,91 triliun.

**Grafik 8. PDB Nominal: Negara-negara terpilih, 2009
(US\$ milyar)**



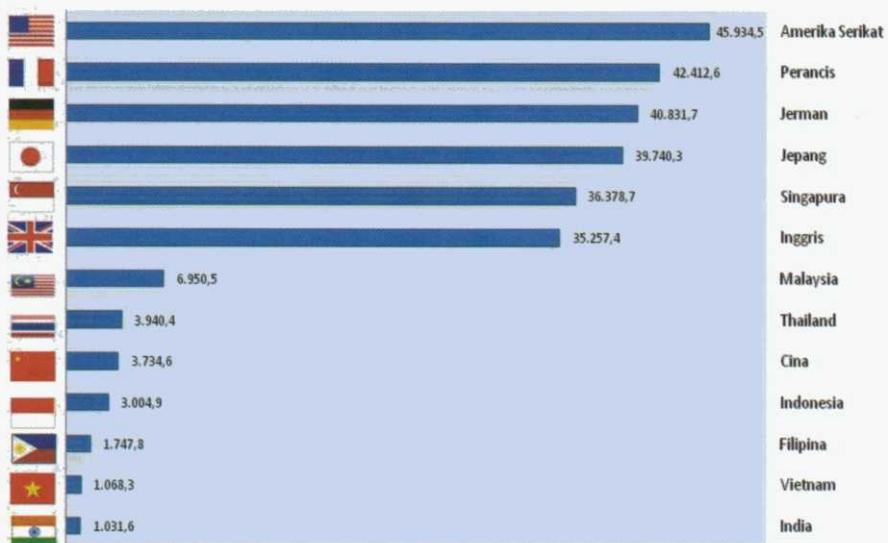
Sumber: IMF ; Data Indonesia menggunakan nilai asumsi PDB Nominal 2011 dengan asumsi kurs Rp9.250/US\$1

Perbandingan PDB per Kapita Indonesia dan Negara lain

PDB per kapita Indonesia sebesar US\$3.004,9 masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara tertangga terdekat seperti Singapura (US\$36.378) dan Malaysia (US\$ 6.950,5). Nilai PDB per kapita Indonesia juga 15,2 kali lebih kecil dibandingkan dengan PDB per kapita Amerika Serikat (US\$45.934,5). Rendahnya produktivitas ekonomi nasional serta jumlah penduduk Indonesia yang tergolong besar ikut mempengaruhi nilai PDB per kapita.

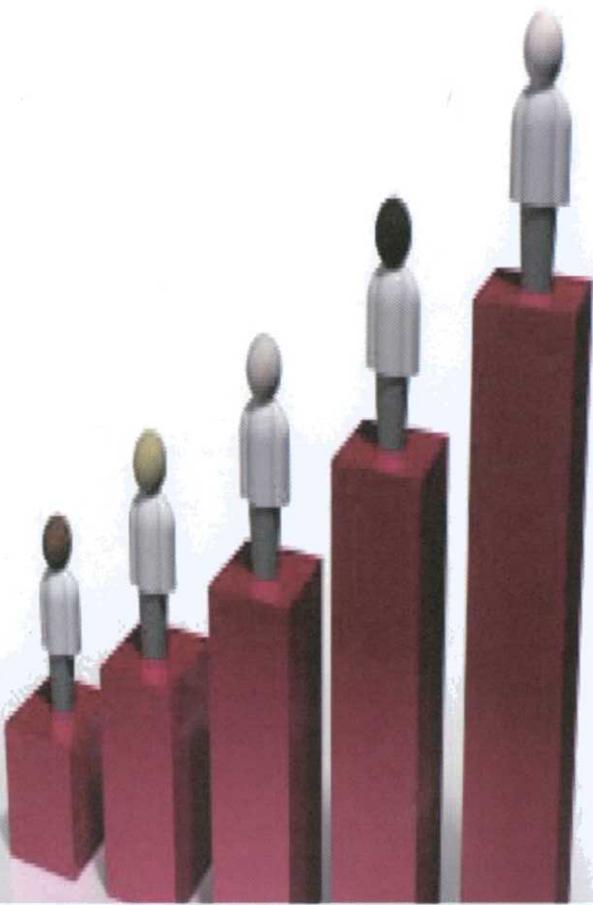
Tantangan bagi para pengambil kebijakan adalah bagaimana mengupayakan alokasi PDB per kapita yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia.

Grafik 9. PDB per Kapita : Negara-negara terpilih, 2009 (US\$)



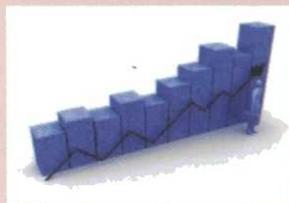
Sumber:

IMF ; Data Indonesia menggunakan nilai realisasi PDB per kapita tahun 2010
 Data untuk Inggris, Jepang dan Filipina merupakan estimasi IMF



PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1996:33).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu asumsi yang digunakan dalam penyusunan RAPBN. Menurut BPS, Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah sama dengan pertumbuhan PDB. Apabila diibaratkan “kue”, PDB adalah besarnya kue tersebut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan membesarnya “kue” tersebut yang diukur dari prosentase pertambahan PDB pada tahun tertentu terhadap PDB tahun sebelumnya.

Rumus pertumbuhan ekonomi adalah :

$$PE = \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) \times 100\%$$

¹ Sumber: Data Strategis BPS, 2010

Keterangan :

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
 PDB = Produk Domestik Bruto
 t = tahun
 t-1 = tahun sebelumnya

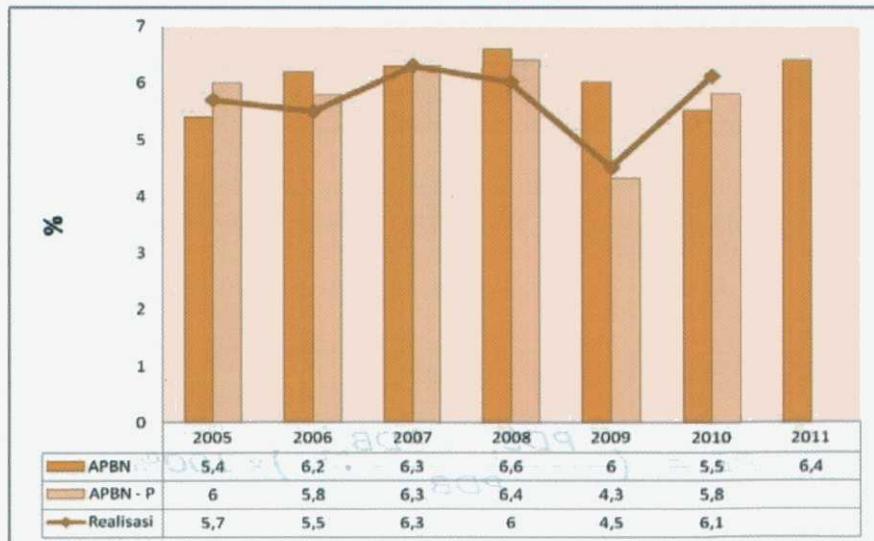


Trend Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode 2005 - 2010 cenderung meningkat dari tahun 2005 sebesar 5,7 persen menjadi 6,1 persen di tahun 2010. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sempat menurun ke angka 4,5 persen akibat imbas krisis ekonomi global.

Realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 sebesar 6,1% melebihi target yang diamanatkan oleh APBN (5,5%) dan APBN-P (5,8%). Pada APBN 2011, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,4%.

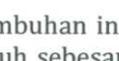
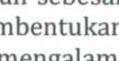
Grafik 10. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, 2005 - 2011 (%)



Sumber: BPS, Data Pokok APBN 2005 - 2010

Berdasarkan data BPS, tahun 2010 sektor atau lapangan usaha yang tumbuh pesat adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (13,5%), dimana pada tahun-tahun sebelumnya sektor ini tercatat memimpin dalam segi laju pertumbuhan. Sektor yang tumbuh pesat berikutnya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,7%), Konstruksi (7%), serta Jasa (6%). Sektor Industri tercatat mengalami kenaikan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,5%. Sebaliknya sektor pertanian mencatat pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 2,9%.

Tabel 1. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, 2005-2010 (%)

Sektor	Laju pertumbuhan						Trend 2005 - 2010
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2,7	3,4	3,5	4,8	4,1	2,9	
Pertambangan & Penggalian	3,2	1,7	1,9	0,7	4,4	3,5	
Industri Pengolahan	4,6	4,6	4,7	3,7	2,1	4,5	
Listrik, Gas & Air bersih	6,3	5,8	10,3	10,9	13,8	5,3	
Konstruksi	7,5	8,3	8,5	7,5	7,1	7	
Perdagangan, Hotel & Restoran	8,3	6,4	8,9	6,9	1,1	8,7	
Pengangkutan & Komunikasi	12,8	14,2	14	16,6	15,5	13,5	
Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6,7	5,5	8	8,2	5	5,7	
Jasa - jasa	5,2	6,2	6,4	6,2	6,4	6	
PDB	5,7	5,5	6,3	6	4,5	6,1	

Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 mencapai 6,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh semua komponen. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,6% dan konsumsi pemerintah tumbuh hanya sebesar 0,3%. Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 8,5% meski sempat mengalami perlambatan di tahun 2009. Komponen ekspor kembali tumbuh sebesar 14,9% dan impor tumbuh sebesar 17,3% setelah mengalami kontraksi di tahun 2009. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya iklim perdagangan internasional pasca diterpa krisis keuangan global.

Tabel 2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran pada PDB, 2005 – 2010 (%)

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Trend 2005 - 2010
Konsumsi Rumah Tangga	4	3,2	5	5,3	4,9	4,6	
Konsumsi Pemerintah	6,6	9,6	3,9	10,4	15,7	0,3	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,9	2,6	9,3	11,9	3,3	8,5	
Ekspor	16,6	9,4	8,5	9,5	-9,7	14,9	
Dikurangi: Impor	17,8	8,6	9,1	10	-15	17,3	
PDB	5,7	5,5	6,3	6	4,5	6,1	

Sumber: BPS

Pertumbuhan Ekonomi dalam APBN 2011

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 adalah *percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat dan daerah*. Dalam APBN 2011 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,4 %.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, mengamanatkan bahwa *pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2011 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:*

- penurunan kemiskinan menjadi sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen) sampai dengan 12,5 % (dua belas koma lima persen); dan*
- pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 400.000 (empat ratus ribu) tenaga kerja.*

Pendapat mengenai Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Biro Humas dan Hukum BPS, M. Sairi Hasbullah pada 13 November 2010 di Bandung mengungkapkan bahwa di Indonesia, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran. **“Teori mengatakan, satu persen *growth* menyerap 300 ribu hingga 400 ribu tenaga kerja, ini ada pada negara maju. Di Indonesia, Thailand, Filipina, dan India tidak berlaku”.**

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Slamet Sutomo menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan setiap tahunnya belum dapat mendongkrak penyerapan tenaga kerja. Pasalnya, **rumus ekonomi yang menyatakan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1% tidak berlaku di Indonesia yang menerapkan pola paduan *capital intensive* dan *labor intensive*.**

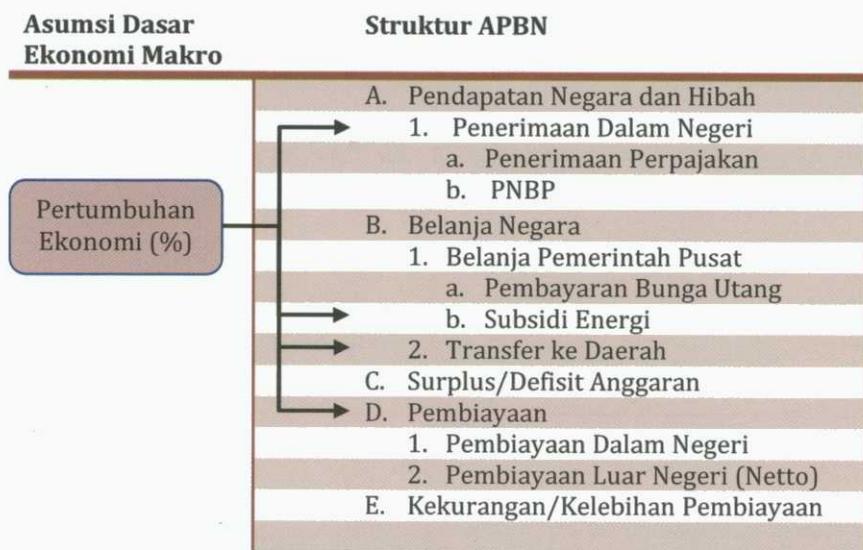
Pengamat ekonomi Sri Adiningsih mengatakan **di Indonesia, ekonomi memang tumbuh, tetapi lapangan kerja yang tercipta justru di sektor informal.**

Sensitivitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Besaran APBN

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besaran APBN. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain mempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Sedangkan pada sisi belanja negara, antara lain mempengaruhi besaran nilai subsidi energi dan dana perimbangan dalam transfer ke daerah sebagai akibat perubahan penerimaan pajak.

Berdasarkan Nota Keuangan dan APBN tahun 2010, apabila pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah 1% dari angka yang diasumsikan, maka defisit RAPBN-P 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp4,1 triliun sampai dengan Rp4,5 triliun.

Gambar 1. Sensitivitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Besaran APBN



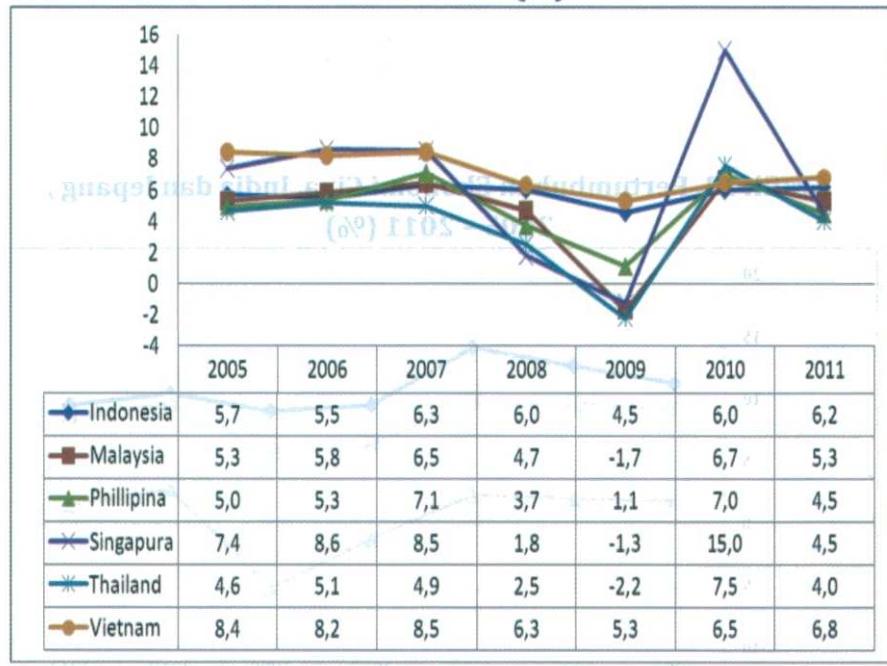
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara lain

Sepanjang periode 2005-2009, negara-negara ASEAN mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan tingkat yang relatif tinggi. Namun pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini secara garis besar mengalami penurunan akibat dampak krisis ekonomi global yang berujung pada kontraksi perekonomian global. Indonesia, Filipina dan Vietnam merupakan negara-negara yang luput dari terpaan krisis dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif meski lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Malaysia, Singapura dan Thailand mengalami pertumbuhan negatif.

Pasca 2009, perekonomian di kawasan ASEAN diperkirakan akan kembali bergairah seiring membaiknya kegiatan perdagangan dunia. Hal ini akan

berakibat pada positifnya angka pertumbuhan sepanjang tahun 2010 dan 2011. Di sisi lain, tingginya aktivitas ekonomi akibat dampak pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kenaikan tingkat harga dan menyebabkan ekonomi mengalami *overheating*. Ancaman inflasi yang kerap menemani pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh para pengambil kebijakan.

Grafik 11. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN, 2005 – 2011 (%)

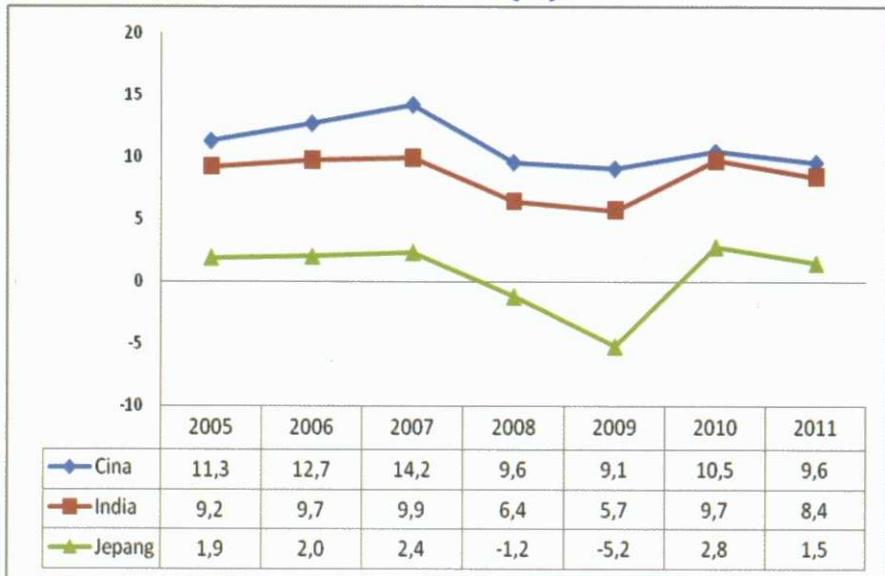


Sumber : IMF, data 2010 dan 2011 merupakan angka proyeksi

Negara-negara Asia lainnya, terutama Cina dan India yang berpenduduk besar terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Cina dan India pada tahun 2009 relatif melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dampak krisis ekonomi global yang menyebabkan turunnya permintaan global akan barang-barang produksi Cina berakibat pada melorotnya pertumbuhan ekonomi Cina ke angka 9,6% pada tahun 2008 dan 9,1% di tahun 2009. Hal yang sama juga terjadi pada India dan Jepang. Jepang bahkan mengalami pertumbuhan negatif sampai -5,2% pada tahun 2009.

Pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan ekonomi tiga negara ini diprediksi akan terangkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekspor dan impor pasca krisis global.

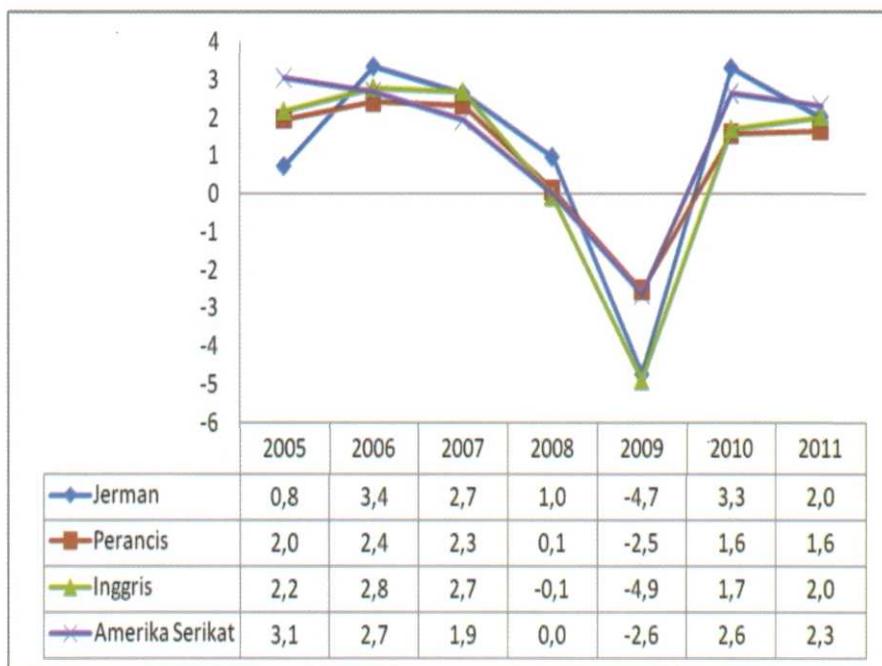
**Grafik 12. Pertumbuhan Ekonomi Cina, India dan Jepang ,
2005 – 2011 (%)**



Sumber : IMF, data 2010 dan 2011 merupakan angka proyeksi

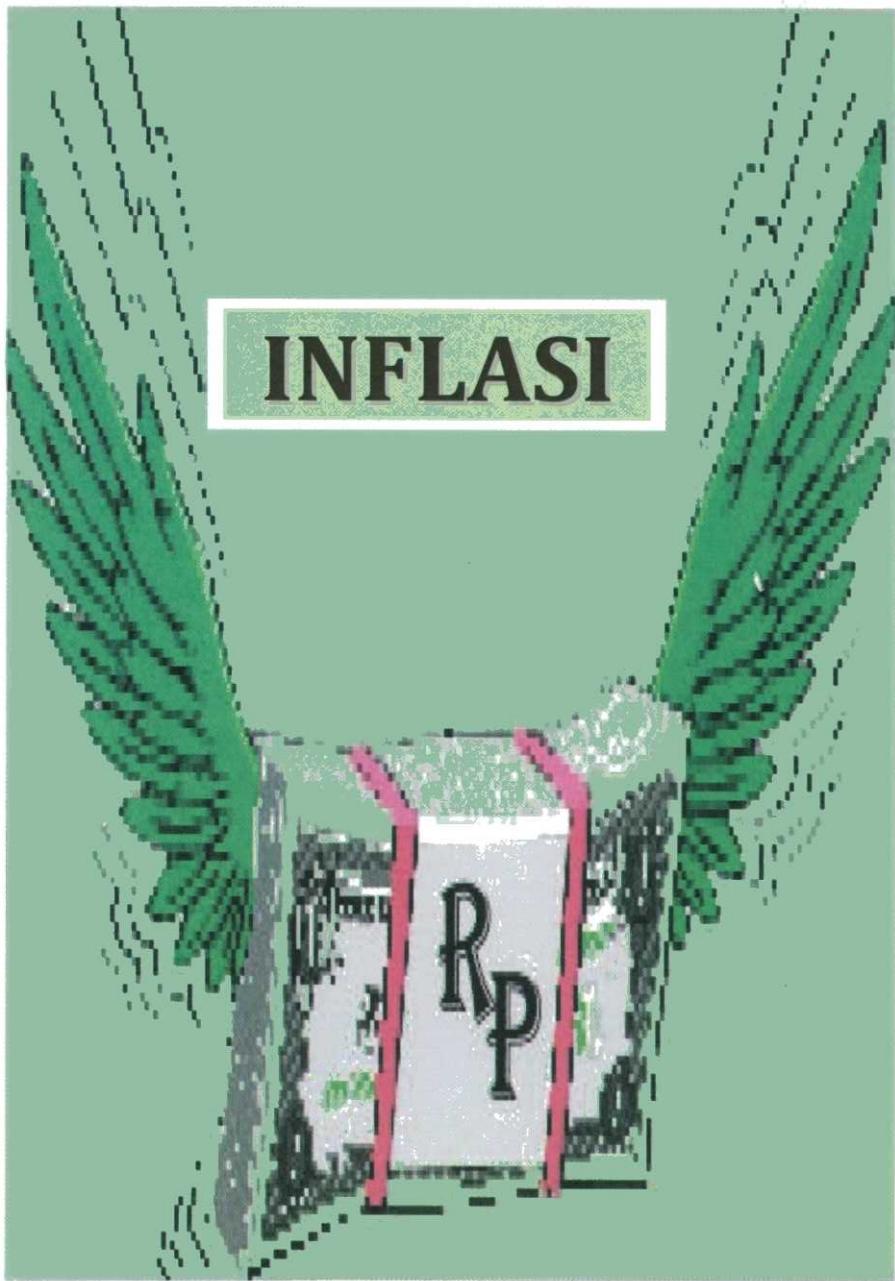
Jerman, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat terus berjuang keluar dari kemelut resesi yang melanda perekonomian mereka. Sepanjang periode 2005 – 2009 tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut cenderung berkisar di bawah angka 4%. Bahkan memasuki periode 2008 – 2009, pertumbuhan negara-negara menjadi jatuh dibawah nol persen. Pasca 2009, perekonomian negara-negara diprediksi akan bergerak kembali ke titik pra-krisis seiring membaiknya iklim perdagangan internasional.

**Grafik 13. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Barat,
2005 – 2011 (%)**



Sumber : IMF, data 2010 dan 2011 merupakan angka proyeksi

INFLASI



INFLASI



Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

- Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
- Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, baik di pasar tradisional maupun modern terhadap beberapa jenis barang/jasa.
- Sebelum tahun 2007, SBH yang digunakan adalah SBH Tahun 2002. Latar belakang penggunaan SBH Tahun 2007 disebabkan karena adanya perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, seperti:
 1. Perubahan pola konsumsi masyarakat
 2. Penyesuaian tahun dasar setiap lima tahun sesuai saran dari ILO dan ESCAP
 3. Perubahan pasar, outlet, dan supermarket
 4. Penambahan sampel (provinsi/kota) baru.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain:

1. **Indeks Harga Perdagangan Besar** (IHPB) harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
2. **Deflator Produk Domestik Bruto** (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negara). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Pengelompokan Inflasi²

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu :

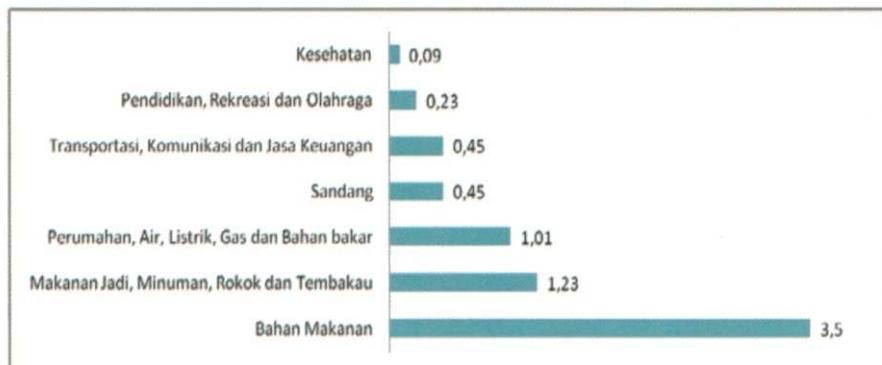
1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Di bawah ini dapat dilihat sumbangan kelompok pengeluaran serta beberapa komoditas yang dominan terhadap inflasi nasional selama tahun 2010³.

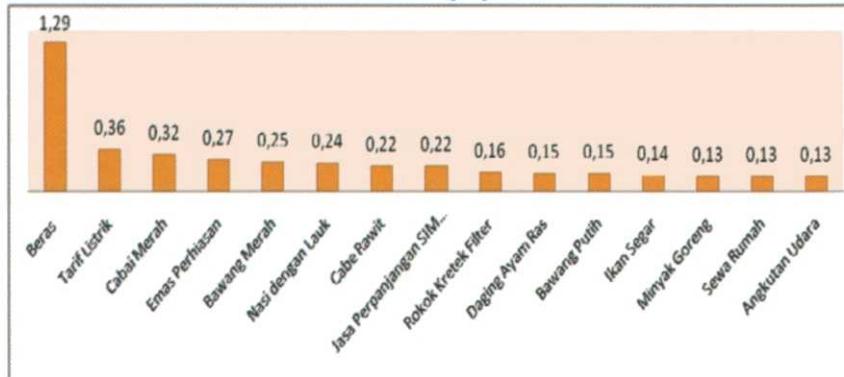
² Sumber: Bank Indonesia

³ Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 14. Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Nasional 2010 (%)



Grafik 15. Sumbangan Komoditas Dominan terhadap Inflasi Nasional 2010 (%)



Disagregasi Inflasi⁴

Selain pengelompokan berdasarkan COICOP di atas, BPS juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh

⁴ Sumber: BPS dan Bank Indonesia



dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagegasi inflasi IHK tersebut dikelompokan menjadi:

1. **Inflasi Inti**, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:

- Interaksi permintaan-penawaran,
- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang,
- Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen.

Berdasarkan SBH 2007 jumlah komoditasnya sebanyak 692 antara lain beras, kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

2. **Inflasi non Inti**, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :

a. **Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food)** :

Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2007, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*.

b. **Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered Prices)**:

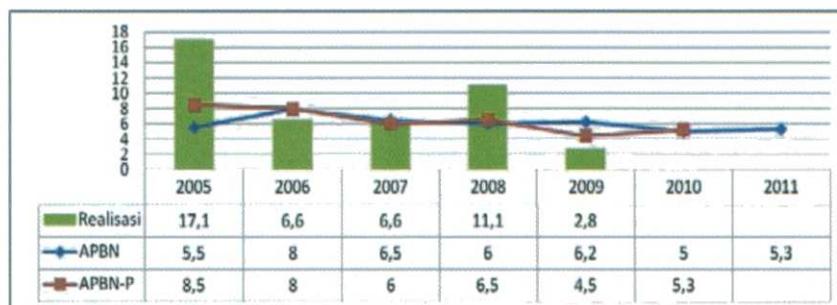
Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya secara umum dapat diatur pemerintah. Berdasar SBH 2007 jumlah komoditasnya sebanyak 21 antara lain bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

Perkembangan inflasi

Laju inflasi pada tahun 2005-2011 relatif cukup stabil pada kisaran 5-8%, kecuali pada tahun 2005 dan 2008 di mana laju inflasi naik secara ekstrim, yaitu 17,1% pada tahun 2005 dan 11,1% pada tahun 2008.

Tingginya inflasi pada tahun 2005 disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak mentah dunia pada tahun 2005 hingga mencapai level US\$60/barrel, sehingga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali, yaitu pada bulan Maret 2005 dan Oktober 2005. Kenaikan harga BBM ini berdampak pada kenaikan inflasi pada tahun 2005. Tekanan inflasi kembali terjadi pada tahun 2008, sebagai dampak naiknya komoditas pangan internasional dan harga minyak dunia.

Grafik 16. Perkembangan Inflasi 2005-2011 (%)



Sumber: LKPP 2005-2009, Data Pokok APBN 2010 dan Lampiran 1 Kesimpulan APBN 2011

KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2011

Pada tahun 2011 laju inflasi diperkirakan sebesar 5,3%, atau sama dengan laju inflasi yang ditetapkan pada APBN-P Tahun Anggaran 2010. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi adalah dengan cara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan sinkronisasi di bidang fiskal, moneter dan sektoral. Selain itu pemerintah juga berusaha untuk menjamin tersedianya pasokan dan lancarnya distribusi barang dan jasa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang komprehensif dan terpadu antara pusat dan daerah serta antara Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut dapat menjaga kestabilan harga domestik, yang pada akhirnya dapat mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

ASUMSI INFLASI 2011

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2010 dan laju inflasi *year on year* (Desember 2010 terhadap Desember 2009) masing-masing 6,96%.

Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo, mengatakan, Bank Indonesia memperkirakan, inflasi inti (*core inflation*) 2011 tidak akan lebih dari 5% plus minus 1, dimana yang akan berpengaruh pada inflasi inti adalah kenaikan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga-harga pangan.

Pada 2009-2010 inflasi bisa terkendali antara lain karena apresiasi rupiah. Tapi, di 2011 telah terjadi kenaikan harga komoditas internasional dan domestik sehingga bisa mendorong inflasi (*headline inflation* yang menghitung total inflasi). Namun, untuk saat ini belum bisa mempengaruhi inflasi inti bergerak *volatile*. Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo memperkirakan, inflasi akan lebih besar dari asumsi 5,3% dalam APBN 2011. Menurutnya, pemerintah akan menjaga sekutu tenaga agar harga-harga terkendali, sehingga inflasi bisa di bawah 7% sepanjang 2011. Inflasi tahun 2011 bisa mencapai 7%.

Sensitivitas Inflasi terhadap besaran APBN

Inflasi, sebagai salah satu indikator ekonomi, digunakan sebagai basis perhitungan APBN. Kenaikan atau penurunan laju inflasi mempengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara sebagai berikut:

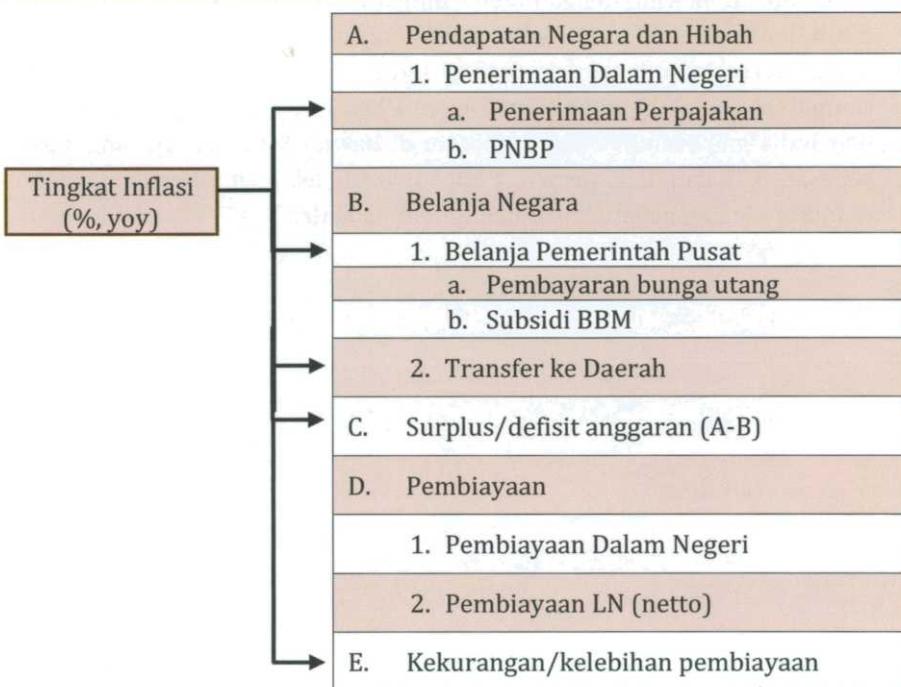
- Pada sisi pendapatan negara, inflasi antara lain akan mempengaruhi penerimaan pajak terutama PPh dan PPN.
- Pada sisi belanja negara, inflasi antara lain mempengaruhi besaran nilai belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan dalam anggaran transfer ke daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak.

- c. Perubahan pada pendapatan dan belanja negara akan merubah surplus/defisit anggaran, yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan pada kekurangan/kelebihan pembiayaan.
- d. Apabila angka inflasi lebih tinggi 0,1 persen dari angka yang diasumsikan, maka penurunan defisit APBN diperkirakan akan berada pada kisaran 0,36 persen dari PDB.

Gambar 2. Sensitivitas Inflasi terhadap Besaran APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Struktur APBN

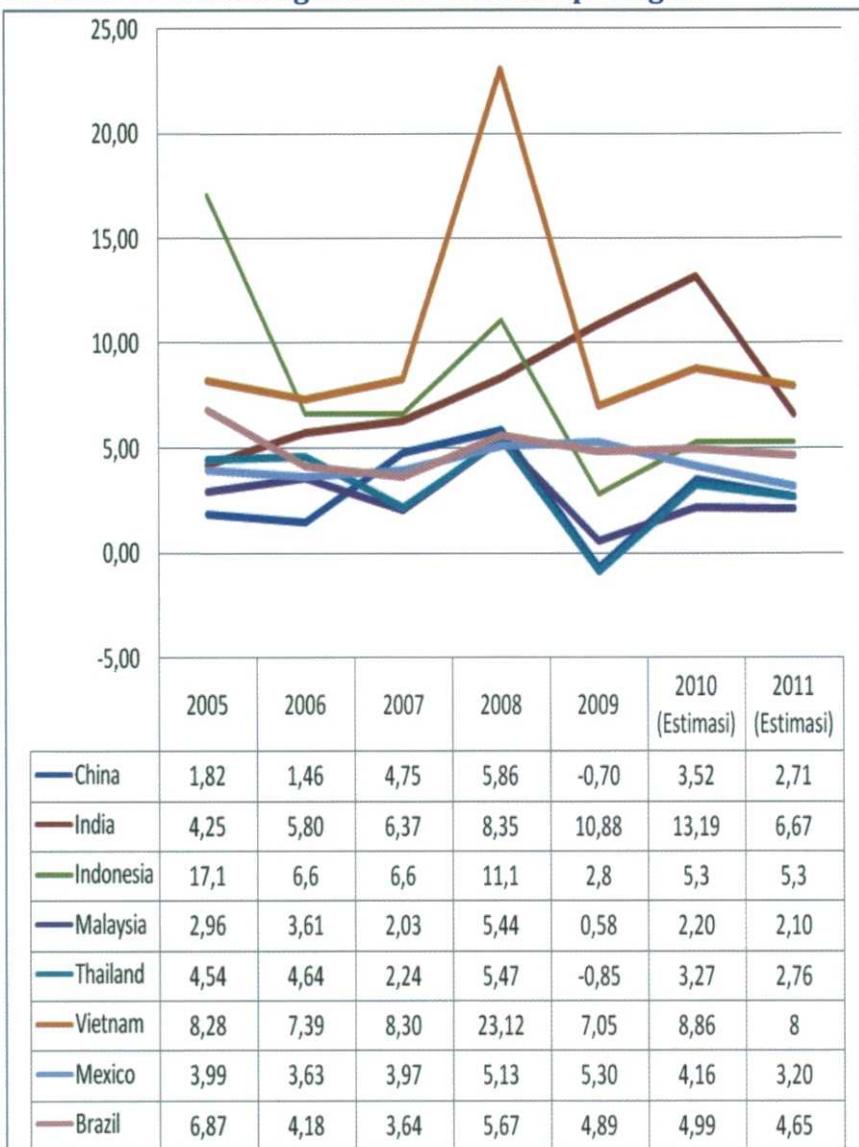


Perbandingan Inflasi:

INDONESIA dan beberapa Negara lain

Laju inflasi di Indonesia sepanjang periode 2005-2011 terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, Cina, Mexico dan Brazil yang memiliki laju inflasi dengan kisaran 2,03% – 6,87%, namun terhitung lebih rendah jika dibandingkan dengan Vietnam dan India. Sebagai dampak naiknya komoditas pangan internasional dan harga minyak dunia pada tahun 2008, laju inflasi di Thailand, Malaysia, Filipina, Cina, Mexico, Brazil, Vietnam, India termasuk Indonesia meningkat dengan tajam, terutama di Vietnam hingga mencapai 23,12% atau 2,78 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan menurunnya harga minyak pada akhir tahun 2008 dan membaiknya kegiatan perdagangan dunia, laju inflasi di negara-negara tersebut menurun, kecuali di India, di mana laju inflasi terus naik sampai tahun 2010 hingga mencapai 13,19%. Penurunan laju inflasi di Cina dan India pada tahun 2009 mencapai di bawah 0 persen, masing-masing sebesar -0,70 dan -0,85 persen. Perkembangan lebih lanjut mengenai inflasi di Indonesia dan negara lain dapat dilihat pada Grafik 17.

Grafik 17. Perbandingan Inflasi di Beberapa Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, IMF, dan CEIC



NILAI TUKAR



NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA



Nilai Tukar atau kurs didefinisikan sebagai *nilai tukar mata uang* antara dua mata uang, yang menggambarkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Nilai tukar yang dipergunakan dalam APBN adalah Rupiah terhadap Dolar Amerika.

- Nilai tukar (kurs) mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.
- Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*) sejak 14 Agustus 1997.
- Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.
- Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

(Sumber: Kementerian Keuangan)

Perkembangan Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2005-2009 bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terutama pada tahun 2009 yang mencapai Rp10.408/US\$1. Akan tetapi untuk tahun 2010 dan 2011 nilai tukar rupiah diperkirakan menguat pada kisaran Rp9.200-9.250/US\$1. Pada tahun 2008 Nilai tukar rupiah mulai mengalami tekanan dengan volatilitas yang cenderung meningkat pada kuartal IV. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan krisis keuangan global, gejolak harga komoditas internasional, dan perlambatan ekonomi dunia. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2008 adalah sebesar Rp9.691/US\$1, melemah sekitar 6% bila dibandingkan dengan nilai tukar pada tahun sebelumnya.

Depresiasi nilai tukar rupiah masih berlanjut pada kuartal I tahun 2009 sebagai dampak dari meluasnya krisis keuangan global. Selanjutnya, rupiah secara gradual terus mengalami penguatan sampai akhir tahun 2009, meskipun secara rata-rata masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai tukar pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2009, rupiah melemah sekitar 7,4% dengan rata-rata sebesar Rp10.408/US\$1.

Perkembangan nilai tukar rupiah periode 2005-2011 dapat dilihat pada Grafik 18.

Grafik 18. Perkembangan nilai tukar rupiah 2005-2011



Sumber : LKPP 2005-2009, Data Pokok APBN 2010 dan Lampiran 1 Kesimpulan APBN 2011, diolah.

Nilai Tukar Rupiah dalam APBN 2011

Pada tahun 2011 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan mencapai rata-rata sebesar Rp9.250/US\$1, atau Rp50,0 lebih tinggi dari perkiraan tahun 2010. Upaya yang dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan volatilitas nilai tukar rupiah serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

- Penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pengawasan lalu lintas devisa.
- Peningkatan koordinasi kebijakan serta peningkatan efektivitas peraturan monitoring lalu lintas devisa untuk menopang kebijakan moneter tersebut.
- Di tingkat internasional dan regional, komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangan seperti *currency safety net* oleh *European Central Bank* (ECB)

Sensitivitas Nilai Tukar terhadap besaran APBN

Kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak terhadap besaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pada sisi pendapatan negara, depresiasi nilai tukar rupiah antara lain akan mempengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dalam denominasi dolar Amerika Serikat serta PPh migas dan PPN.
2. Pada sisi belanja negara, antara lain mempengaruhi: (1) belanja dalam mata uang asing; (2) pembayaran bunga utang luar negeri; (3) subsidi BBM dan listrik; dan (4) belanja ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil migas.
3. Sedangkan pada sisi pembiayaan, berdampak pada: (1) pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek; (2) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; dan (3) privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dilakukan dalam mata uang asing.

Sensitivitas nilai tukar rupiah terhadap besaran APBN dapat dilihat pada Gambar 3. di bawah ini.

Gambar 3. Sensitivitas Nilai Tukar Rupiah terhadap besaran APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Struktur APBN

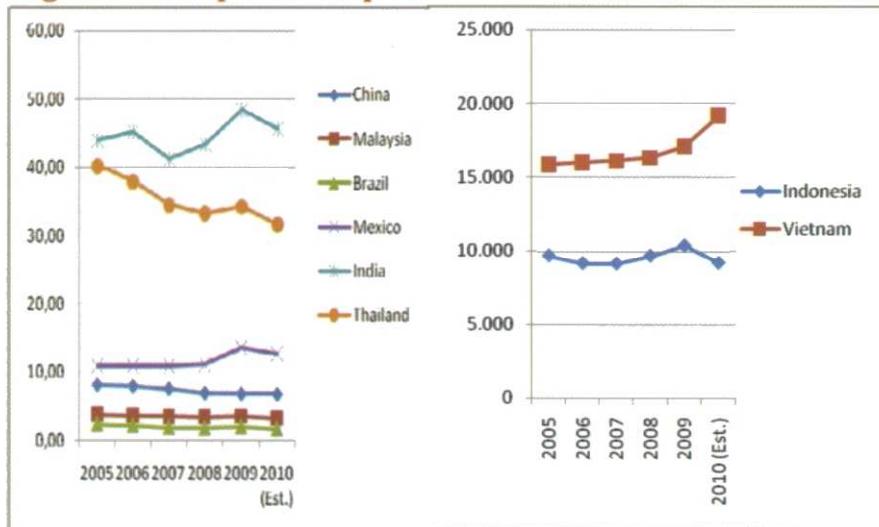


Perbandingan Nilai Tukar: Indonesia dan beberapa negara lain

Nilai tukar mata uang nasional di Cina, Malaysia, Thailand dan Brazil terhadap dollar AS sepanjang tahun 2005-2010 relatif stabil dengan kecenderungan menguat sedangkan nilai mata uang Indonesia, India, Meksiko dan Vietnam melemah pada periode tersebut. Namun secara garis

besar pada tahun 2009 nilai tukar mata uang di negara-negara ini melemah sebagai dampak dari meluasnya krisis keuangan global, kecuali Cina yang nilai tukar mata uangnya tidak mengalami depresiasi pada tahun 2009. Pada tahun 2010 nilai tukar mata uang kembali mengalami penguatan, kecuali Vietnam yang terus melemah sampai tahun 2010. Pada tahun 2011 diperkirakan nilai tukar mata uang akan menguat seiring membaiknya kegiatan perdagangan dunia. Perkembangan nilai tukar mata uang untuk periode 2005-2010 dapat dilihat pada Grafik 19.

Grafik 19. Perkembangan nilai tukar mata uang beberapa negara terhadap dolar AS periode 2005-2010



NEGARA	TAHUN					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (Perkiraan)
Indonesia	9705	9164	9140	9691	10408	9200
Vietnam	15,858,9	15,994,3	16,105,1	16,302,3	17,065,1	19,148,9
China	8,19	7,97	7,61	6,95	6,83	6,77
Malaysia	3,79	3,67	3,44	3,34	3,52	3,22
Brazil	2,43	2,18	1,95	1,83	2,00	1,76
Mexico	10,90	10,90	10,93	11,13	13,51	12,64
India	44,10	45,31	41,35	43,51	48,41	45,73
Thailand	40,22	37,88	34,52	33,31	34,29	31,69

Sumber: Nota Keuangan & APBN 2011 dan CEIC

SUKU BUNGA SBI-3 BULAN



SUKU BUNGA SBI 3 BULAN



Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.

- SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar.
- Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.
- Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme "BI rate" (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. SBI yang selama ini dilelang adalah SBI 1, 3 dan 6 bulan. Pada Agustus dan September 2010 BI mengeluarkan SBI bertenor 9 dan 12 bulan.

Variabel yang mempengaruhi suku bunga SBI 3 bulan ⁵

➤ **Suku bunga Bank Indonesia (BI rate).**

Apabila BI rate naik, suku bunga SBI 3 akan bergerak naik. Sebaliknya apabila suku bunga acuan turun, maka suku bunga SBI 3 bulan akan turun

⁵ Sumber: Kementerian Keuangan

➤ **Ekspektasi inflasi.**

Dalam lelang SBI, para pelaku pasar akan memperhatikan ekspektasi inflasi. Bila inflasi ke depan diperkirakan akan naik, maka imbal hasil yang diminta pelaku pasar juga akan mengalami naik, karena imbal hasil yang diminta mengalami kenaikan, maka suku bunga SBI akan bergerak naik. Demikian pula sebaliknya.

➤ **Suku bunga Bank Sentral Amerika (The Fed.)**

Untuk mencegah terjadinya *capital outflow*, maka suku bunga dalam negeri menyesuaikan dengan suku bunga internasional. Apabila kecenderungan suku bunga internasional naik, maka suku bunga SBI 3 bulan cenderung naik.

Perkembangan Suku Bunga SBI 3 bulan

Tingkat suku bunga SBI 3 bulan pada tahun 2005-2011 cenderung fluktuatif pada kisaran 6,5%-11,7%.

BI *rate* ditetapkan sebesar 8,5% pada Juli 2005 dan terus meningkat hingga mencapai 12,75% pada akhir tahun 2005. Peningkatan BI *rate* tersebut ditujukan untuk mengantisipasi tekanan dan ekspektasi inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan BI *rate* pada tahun tersebut mendorong kenaikan suku bunga SBI 3 bulan dari 8,45% menjadi 12,83%.

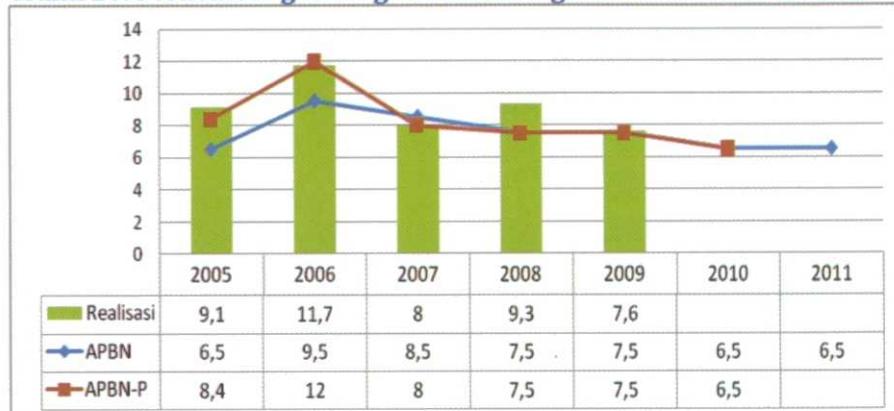
Sejalan dengan relatif stabilnya laju inflasi, pada tahun 2006 dan 2007 BI melakukan kebijakan moneter yang cenderung longgar dengan menurunkan BI *rate* secara *bertahap* yang diikuti dengan menurunnya suku bunga SBI 3 bulan. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan pada tahun 2006 dan 2007 masing masing sebesar 11,73% dan 8,04%.

Meningkatnya laju inflasi pada pertengahan tahun 2008 telah mendorong BI untuk menaikkan BI *rate* hingga mencapai 9,25% pada akhir tahun. Kondisi tersebut menyebabkan suku bunga SBI 3 bulan terus meningkat hingga mencapai rata-rata 9,34%.

Selama tahun 2009, laju inflasi relatif terkendali sehingga BI rate turun hingga mencapai 6,50% sampai akhir tahun 2009. Penurunan BI rate ini juga menyebabkan tingkat suku bunga SBI 3 bulan pada tahun 2009 turun mencapai 7,6%.

Perkembangan tingkat suku bunga SBI 3 bulan dari tahun 2005-2011 dapat dilihat pada Grafik 20.

Grafik 20. Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI 3 bulan 2005-2011



Sumber : LKPP 2005-2009, Data Pokok APBN 2010 & Lampiran 1 Kesimpulan APBN 2011

Asumsi Tingkat SBI 3 bulan dalam APBN 2011

Tingkat suku bunga SBI 3 bulan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011 sama dengan suku bunga pada tahun 2010, yaitu sebesar 6,5% akibat relatif stabilnya suku bunga BI rate sepanjang tahun 2010. Kondisi ini antara lain didukung oleh faktor internal berupa relatif terkendalinya laju inflasi yang didukung oleh kebijakan fiskal, moneter serta sektor riil yang terus semakin membaik. Untuk mengendalikan inflasi dan menyerap kelebihan likuiditas Bank Indonesia menggunakan instrument lainnya di luar suku bunga BI rate, yaitu Giro Wajib Minimum perbankan nasional. Dari faktor eksternal, *the Fed* diperkirakan masih akan tetap mempertahankan suku bunganya yang relatif rendah.

Sebagai Kelanjutan dari kebijakan perpanjangan profil jatuh tempo (*maturity profile*) SBI, pada tanggal 15 Juni 2010 Bank Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan berupa penguatan manajemen moneter dan pengembangan pasar keuangan berupa penerapan *minimum one month holding period* mulai tanggal 7 Juli 2010 yang mewajibkan pembeli SBI, baik di pasar primer maupun sekunder, untuk memegang SBI minimum satu bulan. Kebijakan tersebut selain bertujuan mengurangi arus keluar masuk dana jangka pendek, terutama yang berasal dari modal asing, juga diharapkan dapat memperpanjang kepemilikan SBI maupun transaksinya.

Hubungan SBI 3 bulan dengan besaran APBN

Perubahan pada tingkat suku bunga SBI 3 bulan akan mempengaruhi besaran APBN, yaitu:

- a. Dalam hal ini, peningkatan tingkat suku bunga SBI 3 bulan akan berakibat pada peningkatan pembayaran bunga utang domestik.
- b. Pada tahun anggaran 2010, apabila tingkat suku bunga SBI 3 bulan lebih tinggi 0,25 persen dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp0,3 triliun sampai dengan Rp0,5 triliun (berdasarkan Nota Keuangan dan APBN tahun 2010).

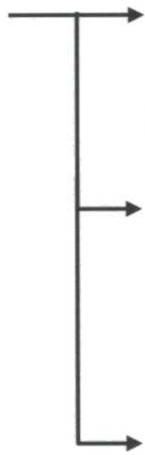
Sensitivitas tingkat suku bunga SBI 3 bulan terhadap besaran APBN dapat dilihat pada Gambar 4. berikut ini.

Gambar 4. Sensitivitas Tingkat Suku Bunga SBI 3 bulan terhadap APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Struktur APBN

**Tingkat Suku
bunga
SBI 3 bln (%)**



- A. Pendapatan Negara dan Hibah
 - 1. Penerimaan Dalam Negeri
 - a. Penerimaan Perpajakan
 - b. PNBP
- B. Belanja Negara
 - 1. Belanja Pemerintah Pusat
 - a. Pembayaran bunga utang
 - b. Subsidi BBM
 - 2. Transfer ke Daerah
- C. Surplus/defisit anggaran (A-B)
- D. Pembiayaan
 - 1. Pembiayaan Dalam Negeri
 - 2. Pembiayaan LN (netto)
- E. Kekurangan/kelebihan pembiayaan

PRO-KONTRA Kebijakan Kenaikan BI RATE 2011

Setelah 18 bulan bertahan pada level 6,5 persen, pada tanggal 4 Februari 2011 Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 6,75 persen. Kenaikan BI Rate dilakukan sebagai upaya untuk meredam laju inflasi yang terus menguat.

IMF, DBS dan HSBC menyambut baik kenaikan BI Rate ini dengan alasan:

1. Untuk mencegah percepatan inflasi dan rupiah tidak *overvalued*
2. Mencegah terguncangnya pasar modal, dimana investor khawatir BI akan menaikkan BI rate sekaligus dan secara drastis untuk mengejar ketertinggalan terhadap angka inflasi.

Menurut analis Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, **"Kenaikan BI Rate direspon positif oleh pasar dengan makin derasnya aliran modal asing ke pasar Indonesia dan membuat rupiah kembali ke level di bawah Rp9.000 per dollar AS"**. Lanjutnya, **"penguatan nilai tukar rupiah akan membantu mengurangi biaya produksi berbasis impor"**, karena seperti diketahui, inflasi yang terjadi lebih banyak didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, yang sebagian besar adalah bahan impor, seperti kedelai, gandum, dan gula, sehingga penguatan nilai tukar akibat kenaikan BI Rate dapat mengurangi tekanan harga produksi di dalam negeri.

Akan tetapi banyak yang mengkhawatirkan bahwa kenaikan suku bunga akan berpotensi meningkatnya kenaikan suku bunga kredit dan selanjutnya akan meningkatkan biaya modal usaha dan pengusaha akan menaikkan harga produk sehingga bebananya akan ditanggung oleh masyarakat luas.

Pemerintah meminta perbankan nasional tidak menaikkan suku bunga kredit karena tingkat *spread* bunganya masih tinggi. Saat ini rata-rata suku bunga dasar kredit (SBDK) atau *prime lending rate* perbankan berada di level 11,84 persen, dan rata-rata bunga deposito sebulan adalah 6,4 persen, sehingga tingkat *spread* bunganya sekitar 6,5 persen. Padahal di negara lain, seperti Malaysia tingkat *spread* bunganya sekitar 3 persen, sedangkan di Filipina sekitar 4 persen.

Perbandingan Suku Bunga SBI 3 bulan dengan Bank Sentral Amerika (*The Fed Rate*)

Sepanjang tahun 2005-2007 tingkat suku bunga bank sentral Amerika (*The Fed Rate*) meningkat hingga mencapai 5,02% per tahun dan kemudian pada tahun 2009 turun drastis hingga 1,92% (atau 2,6 kali lebih rendah dibanding tahun sebelumnya) dan pada tahun 2009 *The Fed Rate* kembali turun hingga menyentuh 0,16%. Penurunan suku bunga tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi meluasnya kredit macet akibat krisis keuangan di Amerika yang terjadi pada tahun 2008. Federal Reserve menyatakan bahwa tingkat suku bunga yang rendah akan dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang.⁶

Sejak 2008 tingkat suku bunga SBI 3 bulan di Indonesia lebih dipengaruhi faktor inflasi dalam negeri, khususnya akibat kenaikan harga BBM tahun 2008.

Tabel 3. Perbandingan Suku Bunga SBI 3 bulan dengan Bank Sentral Amerika (*The Fed Rate*)

Suku Bunga	TAHUN						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (Perkiraan)	2011 (Perkir aan)
SBI 3 Bulan	9,1	11,7	8	9,3	7,6	6,5	6,5
The Fed Rate	3,22	4,97	5,02	1,92	0,16	0,18	

Sumber: Nota Keuangan dan www.federalreserve.gov

⁶ Sumber: www.antaranews.com

HARGA MINYAK



Harga Minyak



Harga Minyak Indonesia dalam Asumsi APBN :

Merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia berdasarkan perhitungan Formula *Indonesia Crude Price* (ICP). Perhitungan ICP mengikuti formula tertentu yang merupakan

referensi harga rata rata tertimbang harga minyak mentah Indonesia dalam perdagangan internasional, dari sumber yang kompeten antara lain: Platts dan RIM.

Harga Minyak Indonesia (*Indonesia Crude Price*)

Digunakannya harga minyak sebagai salah satu asumsi ekonomi makro pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan penerimaan dari minyak bumi dinilai lebih besar dari produksi tambang lainnya (gas dan batubara). Namun, produksi serta harga gas dan batubara tetap diperhitungkan, karena juga merupakan komponen penting dalam menghitung penerimaan negara

Dalam menentukan **Harga Minyak Indonesia**/*Indonesia Crude Price* (ICP) dipergunakan referensi dari sumber informasi yang menyediakan data-data harga minyak yang diperdagangkan di pasar internasional, seperti :

Platts, yaitu penyedia jasa informasi energi terbesar di dunia, jasa informasi tidak terbatas pada minyak, namun juga gas alam, kelistrikan, petrokimia, batubara dan tenaga nuklir.

RIM Intelligence. Co, yaitu badan independen yang berpusat di Tokyo dan Singapore, mereka menyediakan data harga minyak untuk pasar Asia Pasific dan Timur Tengah.

APPI (Asian Petroleum Price Index), yaitu penentuan harga minyak yang dikeluarkan oleh *SeaPac Services* di Hongkong. APPI dianggap sebagai mekanisme penentuan harga yang standar untuk wilayah Asia Timur.

Formula Perhitungan Indonesia Crude Price (ICP)

Formula perhitungan ICP ditentukan oleh Tim Harga Minyak Indonesia dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melakukan evaluasi kinerja penghitungan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP. Evaluasi yang akan dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menjaga akurasi ICP.

Formula harga minyak ICP mengalami penyesuaian :

$$\text{ICP} = \% 40\text{Platts} + 40\% \text{ RIM} + 20\% \text{ APPI}.$$

$$\text{ICP} = 47.5\% \text{ Platts} + 47.5\% \text{ RIM} + 5\% \text{ APPI} \text{ (mulai oktober 2006)}$$

$$\text{ICP} = 50\% \text{ Platts} + 50\% \text{ RIM} \text{ (mulai juli 2007)}$$

ICP bergerak sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional. Terdapat beberapa acuan **Harga minyak bumi internasional**, antara lain mengacu pada harga spot per barrel (159 liter) baik **WTI** (West Texas intermediate)/mentah ringan yang diperdagangkan pada *New York Mercantile Exchange (NYMEX)*, atau dari *Brent* yang diperdagangkan pada *Intercontinental Exchange (ICE)* serta **Tapis (Crude oil malaysian)** yang diperdagangkan di Singapura.

Selain itu untuk memproyeksikan harga minyak Indonesia digunakan pula referensi proyeksi dari beberapa referensi internasional antara lain, *Short Term Energy Outlook Energy International Administration (US-DOE)*, *survey Reuters*, dan perkiraan *Centre for Global Energy Studies..*

Harga minyak mentah sebagaimana harga komoditi yang lainnya berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi pasar minyak itu sendiri. Parameter yang mempengaruhi harga minyak ada yang bersifat fundamental (*supply-demand balance*) dan non-fundamental (perubahan cuaca/musim, situasi geopolitik, kondisi stok/cadangan crude/produk dari negara-negara konsumen utama dunia/OECD, sentimen pasar yang biasanya dipermainkan oleh para spekulasi).

Bahkan dimana harga minyak yang tinggi cukup bertahan agak lama, peranan faktor non-fundamental sangat menonjol sekali al seperti: perubahan spek bensin diberbagai negara bagian di US yang menyebabkan fleksibilitas *output product* menjadi terbatas, stok bensin di US kritis dibawah level minimum, meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah.

Faktor-faktor non-fundamental ini selanjutnya mempengaruhi kondisi psikologi pasar yang dimanfaatkan oleh pemain/spekulan di *future market* untuk mengeruk keuntungan dalam waktu singkat.

Faktor -Faktor yang mempengaruhi harga minyak Indonesia (ICP)

Harga minyak Indonesia dipengaruhi oleh naik turunnya harga minyak dunia. Oleh karena itu, untuk memperkirakan harga minyak Indonesia perlu menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh kepada harga minyak dunia tersebut.

Untuk tahun 2010-2011 ditentukan 8 *benchmark crude* dan 42 minyak mentah Indonesia lainnya untuk menentukan formula ICP. Jenis minyak ini dipilih dari tambang-tambang tertentu/berdasarkan asal lapangannya (API *degree* dan kandungan sulfurnya) yang paling banyak di ekspor dan diperdagangkan di pasaran internasional.

Tabel 4. ICP Formula 2011 (Benchmark)

	Jenis Minyak Mentah	ICP Formula	Harga Januari 2011 (US\$/Bbl)
1	SLC	50 % RIM + 50%PLATTS	99.82
2	ARJUNA	50 % RIM + 50%PLATTS	96.82
3	ATTAKA	50 % RIM + 50%PLATTS	98.87
4	CINTA	50 % RIM + 50%PLATTS	94.15
5	DURI	50 % RIM + 50%PLATTS	90.48
6	WIDURI	50 % RIM + 50%PLATTS	94.23
7	BELIDA	50 % RIM + 50%PLATTS	98.29
8	SENIPAH CONDENSATE	50 % RIM + 50%PLATTS	97.40

Tabel 5. ICP Formula 2011

Produksi minyak mentah Indonesia lainnya yang dipergunakan dalam penetapan ICP antara lain :

No	Jenis Minyak Mentah	No	Jenis Minyak Mentah
1	ANOA	22	LANGSA
2	ARUN CONDENSATE	23	LIRIK
3	BADAK	24	MADURA
4	BEKAPAI	25	MENGOEPEH
5	BELANAK	26	MESLU
6	BENTAYAN	27	MUDI MIX
7	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	28	NSC/KATAPA/ARBEI
8	BULA	29	PAGERUNGAN CONDENSATE
9	BUNYU	30	PAM.JUATA/SANGA2 MIX
10	CAMAR	31	PANGKAH
11	CEPU	32	RAMBA/TEMPINO
12	GERAGAI	33	RIMAU/TABUHAN
13	GERAGAI CONDESTATE	34	SANGATTA
14	HANDIL MIX	35	SELAT PANJANG
15	JAMBI	36	SEPINGGAN YAKIN MIX
16	JATIBARANG	37	SOUTH JAMBI CONDENSATE
17	KAJI	38	TANJUNG
18	KERAPU	39	TIAKA
19	KLAMONO	40	UDANG
20	KOMP. PLB.SLT/TAP/JENE/SERDANG	41	WALIO MIX
21	LALANG	42	WEST SENO

Sumber : Kawat Ditjen Migas, 1 Feb 2011 Penetapan ICP 2011.

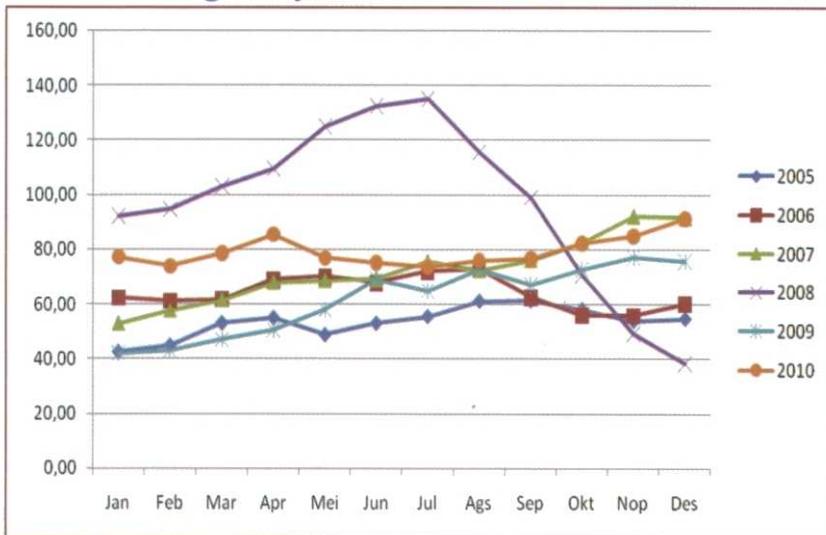
Berikut harga minyak Indonesia berdasarkan atas dasar formula yang ditetapkan Pemerintah (dengan acuan jenis minyak mentah utama/*benchmark crude* dan minyak mentah Indonesia lainnya).

Tabel 6. Asumsi Indonesia Crude Price dan Lifting dalam APBN

Tahun	Harga (US\$/Barrel)
2005 (Realisasi)	51,8
2006 (Realisasi)	63,8
2007 (Realisasi)	69,7
2008 (Realisasi)	97,0
2009 (Realisasi)	61,6
2010 (APBN-P)	80,0
2011 (APBN)	80,0

Data : APBN 2005-2011.

Grafik 21. Harga Minyak Indonesia



Data : ICP Monthly Report 2005-2010, ESDM (diolah).

Sensitivitas Harga Minyak terhadap Besaran APBN

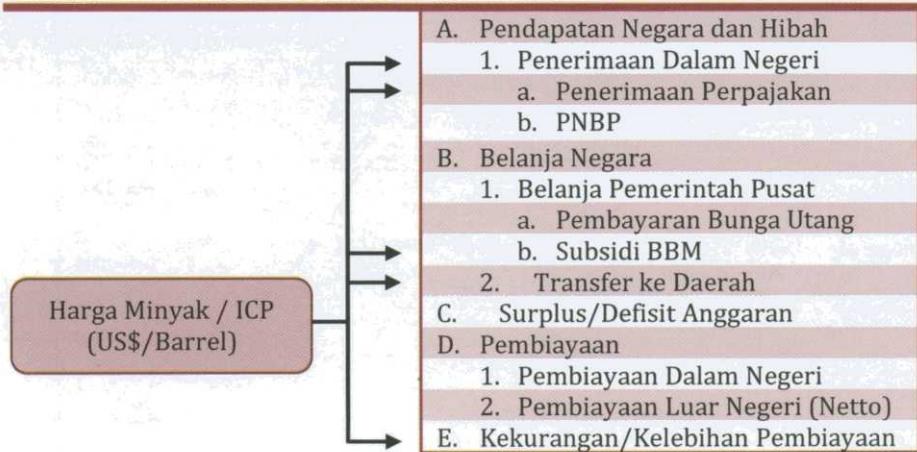
Penentuan asumsi harga dan produksi minyak dalam APBN, akan membawa konsekuensi antara lain pada beberapa pos dalam besaran APBN.

Sensitivitas Harga Minyak Bumi

1. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) mempengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara.
 2. Pada sisi pendapatan negara, kenaikan ICP antara lain akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dari kontrak *production sharing* (KPS) minyak dan gas melalui PNBP.
 3. Peningkatan harga minyak mentah dunia juga akan meningkatkan pendapatan dari PPh migas dan penerimaan migas lainnya.
 4. Pada sisi belanja negara, peningkatan ICP antara lain akan meningkatkan belanja subsidi BBM dan dana bagi hasil ke daerah.

Gambar 5.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Struktur APBN



anggaran selanjutnya, maka kenaikan minyak ini dapat memberi kontribusi
pada hasil defisit sebesar Rp 0,3 triliun.

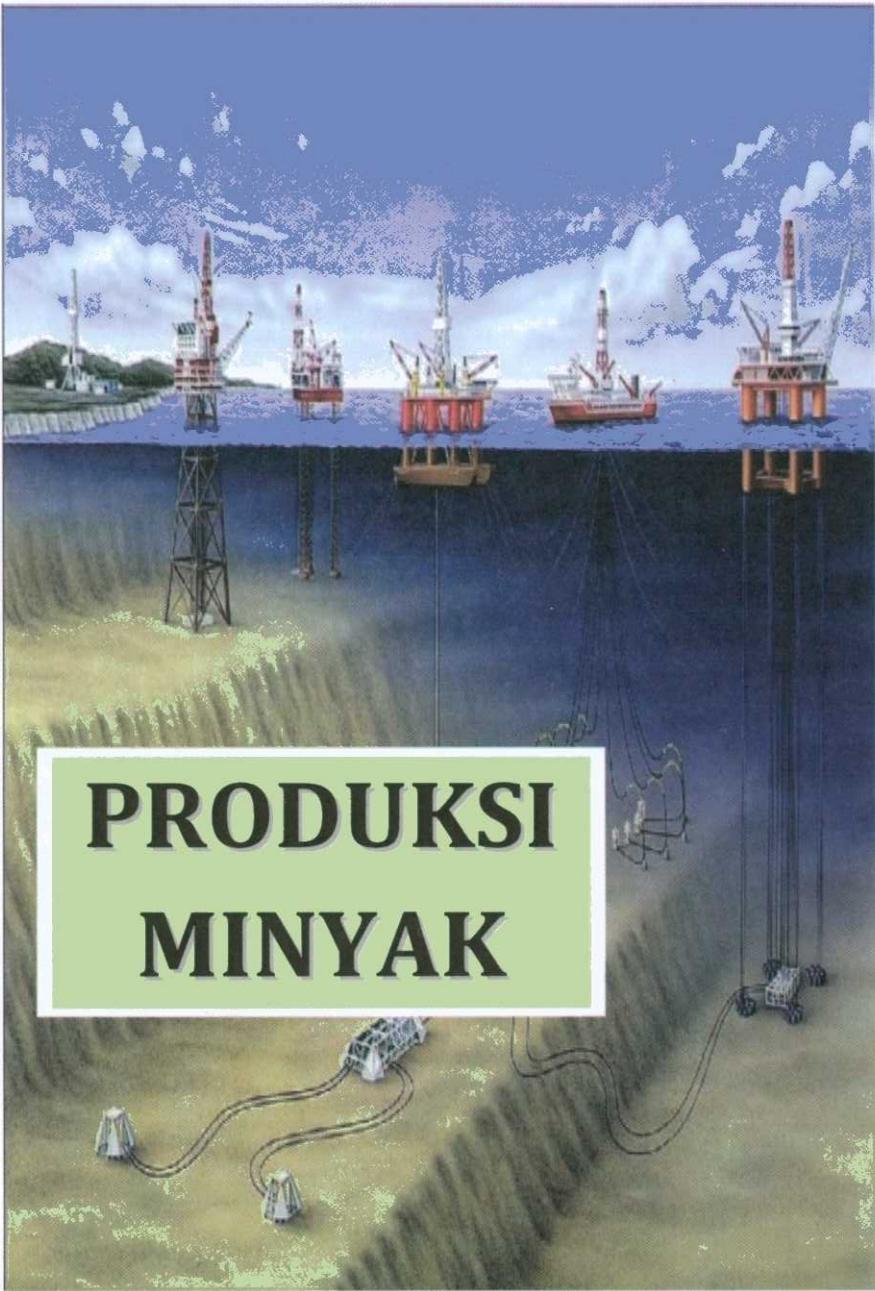
Budget Analysis - Sensitivitas

(Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2010)

Dalam tahun anggaran 2010, apabila rata-rata ICP lebih tinggi US\$1/barrel dari angka yang diasumsikan, maka diperkirakan tambahan defisit pada RAPBN-P 2010 akan menurun berada pada kisaran Rp0,3 triliun sampai dengan Rp0,0 triliun. Penurunan defisit disebabkan *lifting minyak yang tinggi (dari sisi penerimaan negara), dan proporsi penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang rendah sehingga sensitivitas kenaikan ICP terhadap subsidi listrik kecil (dari sisi belanja negara).*

- Eksplorasi adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan cadangan minyak disuatu wilayah tertentu.
- Sedangkan eksplorasi adalah kegiatan untuk menghasilkan minyak di wilayah kerja tertentu dengan pengeboran, penyelesaian sumur, pembangunan sarana transportasi, penyimpanan dan pengolahan, diperuntukkan untuk pemisahan minyak dan gas dan penyulingan serta kegiatan pendukung lainnya.

PRODUKSI MINYAK

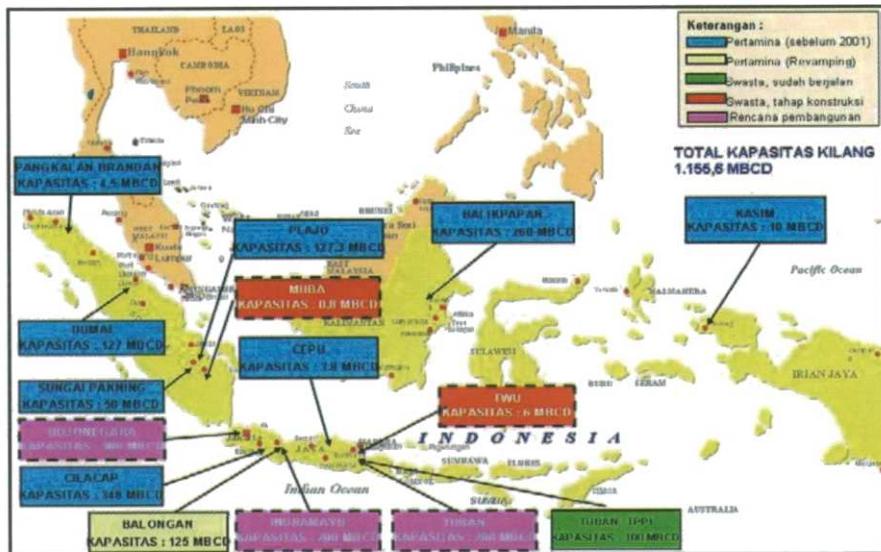


Produksi Minyak



Produksi minyak didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang terdiri dari kegiatan eksplorasi dan eksplorasi minyak.

Gambar 6. Peta Lokasi Kilang Minyak dan Kapasitas Produksi di Indonesia

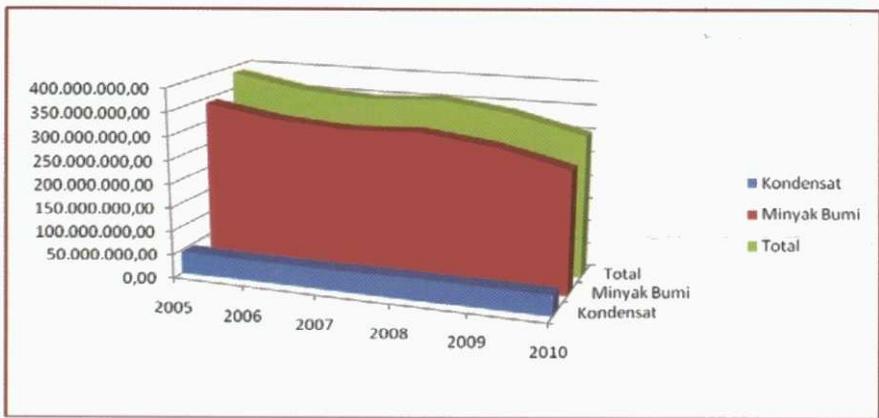


Sumber : Peta Infrastruktur Kilang Minyak, ESDM 2010.

Data produksi minyak bumi dan kondensat diperoleh dari laporan bulanan maupun tahunan dari perusahaan-perusahaan minyak yang melakukan eksplorasi tambang-tambang minyak yang terdapat di Indonesia. Perusahaan yang melakukan eksplorasi tersebut, antara lain Pertamina dan mitranya, *Production Sharing Contract* (PSC) baik daratan maupun lepas

pantai serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) daratan maupun lepas pantai.

Grafik 22 . Produksi Minyak Indonesia



Tabel 7. Produksi Minyak dan Kondensat

Tahun	Minyak Bumi	Kondensat	Total
2005	339.253.904,00	46.454.875,00	385.708.779,00
2006	315.919.775,00	43.369.562,00	359.289.337,00
2007	304.897.012,00	43.417.933,00	348.314.945,00
2008	311.103.057,00	45.333.729,00	356.436.786,00
2009	293.287.023,00	43.973.814,00	337.260.837,00
2010	257.291.667,00	42.810.315,00	300.101.982,00
TOTAL	1.821.752.438,00	265.360.228,00	2.087.112.666,00

Data : Datawarehouse 2005-2010, ESDM (diolah).

Catatan :

Minyak bumi adalah hasil eksplorasi yang komponen kimianya dapat dipisahkan oleh proses distilasi, yang kemudian, setelah diolah lagi, menjadi minyak tanah, bensin, lilin, aspal, dan produk-produk turunan lainnya.

Sedangkan kondensat adalah hasil kondensasi komponen berat gas alam. Kondensat terjadi secara alami. Biasanya juga masuk dalam kategori gas. Tapi, dalam data produksi "diklaim" sebagai minyak (karena sifat cairnya). Kondensat dapat disamakan dengan minyak mentah karena bisa diolah.

Kondensat sendiri memiliki nilai oktan yang lebih rendah dari bensin tapi lebih tinggi dari minyak tanah. Kondensat biasanya digunakan industri sebagai pengganti minyak tanah.

Sensitivitas Produksi Minyak terhadap Besaran APBN

Penentuan produksi minyak dalam APBN, akan membawa konsekuensi antara lain pada beberapa pos dalam struktur APBN.

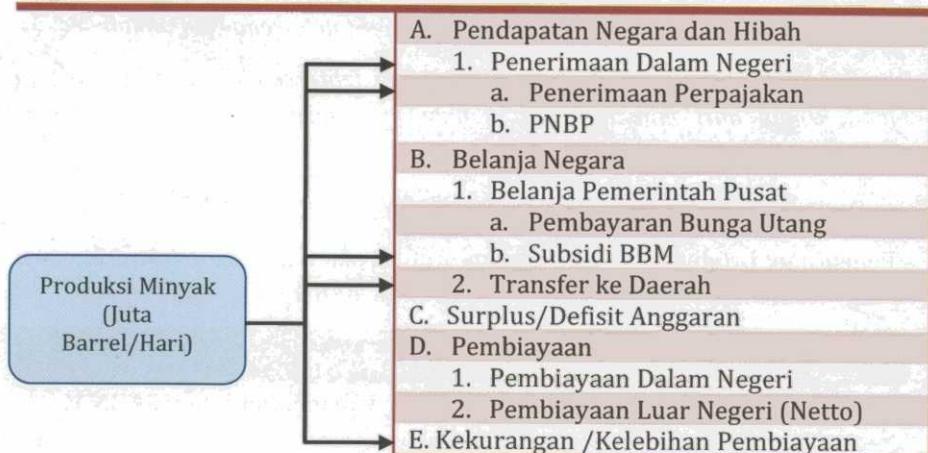
Sensitivitas Produksi Minyak Bumi

1. Penurunan *lifting* minyak domestik juga akan memengaruhi APBN-P pada sisi pendapatan dan belanja negara.
2. Pada sisi pendapatan, penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan PPh migas dan PNBP migas.
3. Pada sisi belanja negara penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah.

Budget Analysis – Sensitivitas

(Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2010)

Pada tahun anggaran 2010, apabila realisasi *lifting* minyak domestik lebih rendah 10.000 barrel per hari dari yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2010 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp3,0 triliun sampai dengan Rp3,34 triliun .

Gambar 7.**Asumsi Dasar Ekonomi Makro****Struktur APBN****Penerimaan Migas dalam APBN**

Penentuan asumsi harga dan produksi minyak dalam APBN, terutama akan membawa konsekuensi antara lain pada Pos Penerimaan dari sumber Migas dalam struktur APBN.

Penerimaan Migas dalam APBN

PPh Migas : Penerimaan atas pembayaran pajak-pajak (PPs/PPh dan PBDR/PPh Psl. 26) oleh KKKS.

PNBP SDA Migas : Penerimaan atas bagian pemerintah (*government share*) setelah dikurangi dengan pajak-pajak dan pungutan lainnya (PPN, PBB, PDRD, dan *fee* kegiatan usaha hulu migas).

PNBP Lainnya : Penerimaan atas penyerahan minyak mentah DMO KKKS

Ketentuan Perhitungan dalam Penerimaan Migas

1. *Penerimaan Migas bersumber dari kegiatan usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Kontraktor Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (Manajemen ditangan BPMIGAS, kontraktor menyediakan semua dana, teknologi, dan keahlian, kontraktor menanggung semua resiko finansial).*
2. *Atas kegiatan usaha hulu migas tersebut setelah dikeluarkan biaya untuk memproduksi migas dibagikan hasil antara Pemerintah dan Kontraktor*
3. *Pola bagi hasil (share) antara Kontraktor dan Pemerintah ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.*
4. *Atas Bagian Kontraktor (contractor share):*
 - a) *25% wajib diserahkan kepada negara dalam rangka penyediaan kebutuhan BBM dalam Negeri (Domestic Market Obligation)*
 - b) *Selain kewajiban DMO, dalam KKS juga diatur bahwa Kontraktor wajib melakukan pembayaran pajak-pajak (PPs/PPh dan PBDR/PPh Psl. 26) namun dibebaskan dari pajak-pajak dan pungutan lainnya (PBB, PPN dan PDRD)*

(Sumber : UU No. 22/2001, PP No. 41/1982, PP No. 42/2002, PP No. 35/2004, Permen ESDM No. 22 tahun 2008, Permen ESDM No. 06/2010)

Asumsi Produksi dan Harga Gas Alam, Batubara dan Panas Bumi dalam APBN

Selain asumsi produksi/harga Minyak, asumsi produksi/harga gas alam , batubara dan panas bumi menjadi bahan referensi juga dalam asumsi APBN. Sebab, gas, batubara dan panas bumi merupakan sektor energi yang berpeluang besar untuk meningkatkan penerimaan negara.

Satuan harga gas sebagai acuan adalah US\$ per mile-mile british thermal unit (mmbtu), satuan harga batubara US\$/ton dan panas bumi US\$/SBM. Sedangkan satuan produksi gas adalah mile standard cubic feet (MSCF), Batubara adalah ton dan panas bumi adalah setara barrel minyak (SBM).

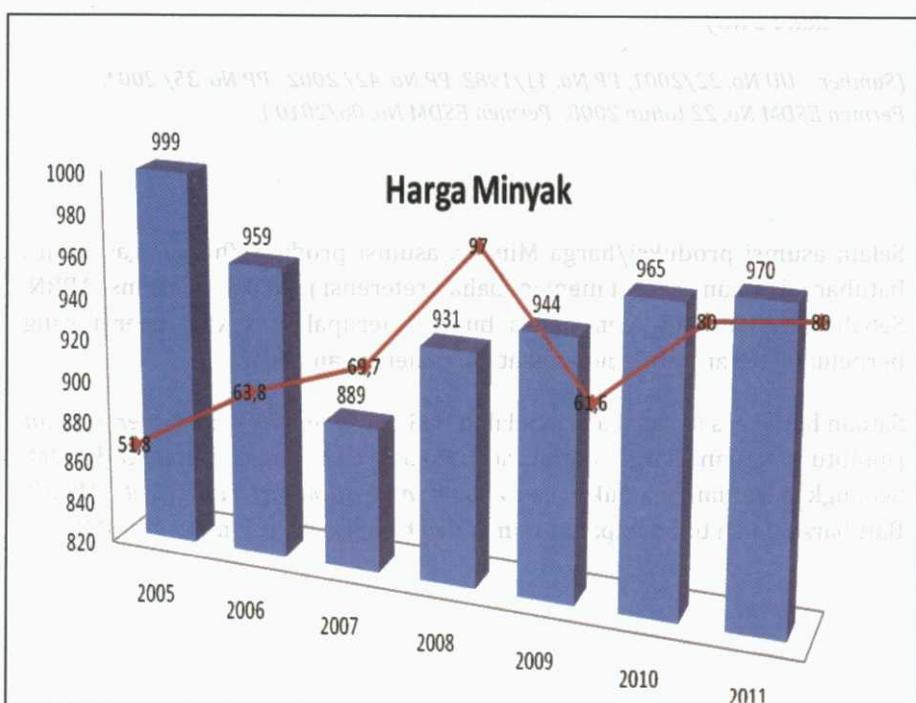
Tabel 8. Produksi Gas Alam, Batubara, Panas Bumi

Tahun	Gas Alam (MSCF)	Batubara (Ton)	Panas Bumi (SBM)
2006	2.947.048.632,00	179.580.407,15	7.176.112,61
2007	2.805.999.464,00	178.790.755,68	4.700.178,56
2008	2.891.929.375,00	194.391.850,37	16.227.000,00
2009	3.024.841.099,00	226.170.443,14	-
2010	793.696.526,00	150.601.921,14	-

Data: Datawarehouse 2005-2010_FSDM (Keterangan - : tidak diperoleh data)

DATA TAHUN BUDIDAYA 2008-2010, BUDAYA (Ketebelingan - Petakupersten atau)

Grafik 23. Asumsi Indonesia Crude Price dan Lifting dalam APBN



Tabel 9. Asumsi Lifting Minyak dalam APBN

Tahun	Produksi (BMCD)
2005 (Realisasi)	999
2006 (Realisasi)	959
2007 (Realisasi)	889
2008 (Realisasi)	931
2009 (Realisasi)	944
2010 (APBN-P)	965
2011 (APBN)	970

Data : APBN 2005-2011.

Subsidi Migas dalam APBN

Penentuan asumsi harga dan produksi minyak dalam APBN, juga akan membawa konsekuensi pada Pos Belanja dalam struktur APBN, yaitu Pos Belanja Subsidi.

Mengingat hal tersebut maka kenaikan harga minyak, walaupun diikuti dengan naiknya penerimaan migas, namun harus dikurangi dengan subsidi energi (BBM dan Listrik). Sehingga penerimaan migas tersebut belum tentu memberikan tambahan yang tinggi kepada pendapatan negara (*net impact*).

Tabel 10 . Produksi, Konsumsi, Eksport dan Impor Minyak Bumi

Tahun	Produksi	Konsumsi	Eksport	Impor
2005	385.708.779	216.210.921	156.766.006	120.159.325
2006	359.289.337	218.021.979	114.147.764	113.545.934
2007	348.314.945	202.912.119	127.134.792	111.067.245
2008	356.436.786	183.744.620	128.058.149	92.175.358
2009	337.260.837	256.671.588	117.212.907	86.665.068
2010*	300.101.982	119.505.739	63.264.354	28.782.890
TOTAL	2.087.112.666	1.197.066.967	706.583.972	552.395.820

* 2010 Angka Konsumsi (Januari-April), Ekspor (Januari-Juli) dan Impor (Januari-April).

Data: Datawarehouse 2005-2010, ESDM.

Bila harga minyak naik, pos subsidi dalam APBN terkait migas akan ikut berubah:

Naik turunnya pos Subsidi BBM tergantung pada produksi minyak mentah, produksi (kilang) BBM, dan tingkat konsumsi BBM. Konsumsi BBM yang tinggi (yang tak diimbangi dengan peningkatan produksi minyak mentah) mengakibatkan tingginya impor minyak mentah dan impor BBM. Kedua hal ini memiliki pengaruh sangat besar dalam menaikkan angka Subsidi BBM. Begitu juga dengan subsidi non-BBM juga akan ikut naik (Subsidi Listrik).

Adanya subsidi BBM berarti merupakan pengeluaran rutin negara setiap tahunnya. Pada 2006 terjadi perubahan model subsidi BBM yaitu dari model subsidi **Cost and Fee** menjadi **MOPS Plus Alpha** yang berpengaruh pada perhitungan subsidi BBM sebagai pengeluaran negara.

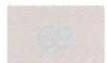
Besaran harga untuk penilaian besaran alokasi BBM bersubsidi, antara lain besaran MOPS (*Mid Oil Platt's Singapore*).

Besaran Harga BBM Bersubsidi

Subsidi Jenis BBM Tertentu per liter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter jenis BBM tertentu. Sedangkan *Harga Patokan* adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan **MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya** ditambah *Alpha* (yang terdiri dari : biaya pengiriman, penyimpanan, dan distribusi serta margin perusahaan dan ritel).

Berikut adalah penghitungan besarnya subsidi BBM yang tergantung pada harga patokan:

Subsidi = Volume JBT X (**Harga Patokan** – Harga Eceran (tidak termasuk pajak))



Harga Patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin. Berdasarkan Perpres No. 55/2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres No. 9/2006, dan Perpres No. 71/2005 bahwa MOPS atau **Mid Oil Platt's Singapore** adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. MOPS sebenarnya adalah singkatan dari **Mean of Platts Singapore** yang merupakan penilaian produk untuk *trading* minyak di kawasan Asia yang dibuat oleh *Platts*. Dengan telah ditetapkan ketentuan mengenai MOPS sebagai dasar Harga Patokan, **harga Patokan BBM Indonesia sangat tergantung pada harga yang muncul pada transaksi jual beli minyak di Singapore**.

Budget Analysis - Sensitivitas

Dengan konsumsi yang BBM meningkat sedangkan produksi minyak mentah menurun. Kenaikan konsumsi diimbangi dengan kenaikan impor (minyak mentah dan BBM), mengakibatkan melonjaknya angka Subsidi BBM. Pendapatan SDA Alam (meskipun mengalami peningkatan) namun sudah tak dapat lagi meng-cover kenaikan subsidi BBM. Sehingga mendorong terjadinya defisit anggaran.

Kebijakan pengurangan subsidi :

Perkiraan penghematan BBM subsidi 2011, jika dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah (antara lain melalui pembatasan BBM) adalah sebesar 2,11 juta kiloliter atau setara dengan Rp3,80 triliun. Angka itu didapat dari penghematan BBM jenis premium sebesar 3,24 juta kl atau setara Rp5,38 triliun. Dikurangi dengan permintaan solar yang sebesar 1,13 juta kl atau setara Rp2,03 triliun

Darwin Zahedy Saleh (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011)

Pendapat beberapa pengamat bidang perminyakan mengenai kebijakan pengurangan subsidi BBM:

Di tahun 2011, untuk kenaikan harga premium sebesar Rp500 per liter saja, sudah akan diperoleh penghematan anggaran subsidi sebesar Rp11,6 triliun. Maka, meski pahit, kenaikan harga BBM dalam besaran terbatas kiranya merupakan pilihan kebijakan yang relatif lebih rasional guna mengantisipasi kecenderungan tingginya harga minyak. Pembatasan BBM bersubsidi diperkirakan membawa tambahan inflasi mencapai 0,7 persen, atau berarti bisa lebih tinggi jika dibanding menaikkan harga BBM dalam besaran terbatas.

Distorsi dan permasalahan-permasalahan baru juga akan muncul, karena pasar gelap premium bersubsidi yang akan sangat sulit diawasi lantaran disparitas yang lebar antara harga premium dan pertamax.

Pri Agung Rakhmanto (Direktur Reform Miner Institute , 2011)

Biaya pokok premium saat ini adalah Rp6.030 pada saat harga minyak mentah US\$90/barrel dan dengan nilai US\$1 setara dengan Rp9.000. Jadi jika pemerintah ingin menghilangkan subsidi, maka harga premium bisa dinaikkan secara bertahap atau langsung hingga menyentuh angka tersebut. Harga itu jauh lebih murah ketimbang rakyat harus membeli pertamax. Misalnya, kalau Premium itu jumlahnya 10 juta kilo liter, keuntungannya 10 juta kilo liter dikali subsidi Premium. Itu keuntungan dan penghematan atas pembatasan subsidi BBM itu. Tetapi rakyat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh BBM sebanyak jumlah kendaraan plat hitam dikali selisih harga Pertamax dikurangi Premium, yang saat ini Pertamax Rp 8.500.

Kurtubi (Pengamat Perminyakan, 2011)

Kebijakan Harga BBM di Negara-Negara Lain :

Di dunia terdapat berbagai **rezim politik harga BBM**:

- Negara melepaskan harga ke pasar.
- Negara ikut dalam pengaturan harga BBM melalui kebijakan **Pajak** hingga **Subsidi** yang bervariasi.

Negara - negara Eropa Barat menerapkan pajak (karbon, lingkungan) yang tinggi, membuat harga BBM di sana sangat mahal. Negara-negara itu

(juga **Korea, Jepang, Singapura** di Asia) memiliki tingkat ekonomi (**GDP**) yang tinggi danketergantungan pada impor minyak yang sangat tinggi pula. **Amerika Serikat** melepaskan harga BBM ke pasar, Pemerintah hanya mengambil pajak yang minimum dari rantai industri minyak buminya. Harga BBM di AS murah dibandingkan di Eropa dan Singapura. Sebagian besar anggota **OPEC** (Saudi Arabia, **Venezuela**, Iran) menerapkan harga BBM murah. Ekspor minyak mereka sangat besar dibandingkan yang dibutuhkannya di dalam negeri. **Norwegia** adalah produsen dan pengekspor minyak yang sangat besar, namun menerapkan kebijakan harga BBM yang sangat mahal untuk masyarakat di negerinya sendiri.

Perkembangan Harga Minyak Dunia Saat Ini

Belum reda pengaruh krisis politik di Mesir yang telah membuat harga minyak menembus US\$102/barrel beberapa pekan lalu, kini harga minyak telah menembus level US\$120/barrel, kali ini dipicu oleh gejolak politik di Libya.

Berbeda dengan Mesir yang hanya memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 4,4 miliar barrel dan tingkat produksi sekitar 700.000 barrel per hari, Libya saat ini memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 44 miliar barrel dan tingkat produksi mendekati 1,7 juta barrel per hari (BP Statistical Review, 2010).

Libya adalah negara di Afrika yang memiliki cadangan minyak terbesar saat ini (sekitar 35 persen cadangan minyak Afrika berada di Libya) dan sekaligus anggota OPEC. Ditinjau dari sisi fundamental pasar minyak dunia, produksi Libya jauh lebih signifikan dibandingkan Mesir. Logis jika efek yang ditimbulkannya terhadap harga minyak dunia juga lebih besar dibandingkan Mesir.

Namun, bukan faktor fundamental itu saja sejatinya yang membuat harga minyak bergejolak lebih dahsyat hingga menembus US\$120/barrel, melainkan kadar ketidakpastiannya yang secara relatif dipandang lebih tinggi oleh para pelaku pasar (minyak dunia) sehingga memunculkan dan mendorong spekulasi.

Unsur ketidakpastian tetap akan tinggi. Berarti tingkat keseimbangan harga minyak, meskipun akan berfluktuasi, juga tetap berada di kisaran tinggi. Dengan informasi yang ada saat ini, kisaran US\$90-95/barrel adalah keseimbangan rata-rata yang mungkin akan terbentuk, setidaknya dalam paruh pertama tahun 2011 ini.

Implikasi bagi perekonomian nasional, khususnya APBN yang hingga saat ini masih mematok angka US\$80/barrel sebagai asumsi makro, adalah bahwa akan (kembali) terjadi penambahan defisit. Simulasi Reforminer Institute menghitung, setiap harga minyak 1 dollar AS per barrel di atas asumsi, ceteris paribus, subsidi energi (BBM dan listrik) akan bertambah sekitar Rp3,4 triliun, sedangkan penerimaan migas hanya akan bertambah sekitar Rp2,6 triliun. Dengan demikian, akan terjadi penambahan defisit APBN sekitar Rp0,8 triliun untuk setiap harga minyak US\$1/barrel di atas asumsi. Artinya, jika harga minyak rata-rata ada di kisaran US\$90-95 /barrel sepanjang tahun dan asumsi yang digunakan masih tetap US\$80/barrel, tambahan defisit APBN yang akan terjadi, ceteris paribus, mencapai Rp8-Rp12 triliun.

Pilihan kebijakan yang tersedia dan layak untuk tahun 2011 ini memang tak banyak. Namun, beberapa di antaranya memang harus dilakukan. Pertama adalah mengubah asumsi harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) di APBN. Kisaran ICP US\$86-90/barrel (berkorelasi dengan harga minyak dunia US\$90-95/barrel) adalah level yang lebih realistik dan mencerminkan dinamika yang ada.

Tanpa perubahan asumsi, dengan cadangan fiskal yang ada, APBN hanya akan mampu "bertahan" di kisaran ICP tak lebih dari US\$82/barrel. Tak perlu berkukuh mempertahankan asumsi ICP US\$80/barrel karena faktor-faktor yang ada memang tak membentuk keseimbangan harga di level itu. Kedua, menambah alokasi kuota BBM bersubsidi di APBN sebagai konsekuensi dari dibatalkan atau ditundanya kebijakan pembatasan bensin premium.

Ketiga, menyiapkan program-program jaring pengaman sosial dan langkah-langkah pengendalian inflasi untuk mengantisipasi jika kebijakan kenaikan harga BBM pada akhirnya diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini, toleransi rata-rata ICP 10 persen di atas asumsi adalah batas yang rasional bagi pilihan kebijakan disesuaikan tidaknya harga BBM di dalam negeri.

Tak rasional dan tak bijaksana kiranya jika di tengah gejolak harga minyak saat ini tetap saja "menjanjikan" tak akan ada kenaikan harga BBM. Pendekatan yang mengedepankan rasionalitas ekonomi hendaknya lebih diutamakan daripada pendekatan politis-populis.

(Dikutip dari "KOMPAS, Sabtu-26 Februari 2011, Risiko Harga Minyak, Pri Agung Rakhmanto")

Penutup

Dari penjelasan masing-masing asumsi dasar tersebut, tampak bahwa ketujuh asumsi berkaitan satu dengan yang lain dan mempengaruhi besaran APBN, baik di sisi pendapatan maupun belanja negara secara searah atau berlawanan. Untuk itu, diperlukan dasar perhitungan yang tepat sehingga pengalokasian anggaran dalam APBN dapat terukur, terarah, dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan.

